BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka disusun sasaran dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus atau agenda pembangunan bersifat strategis yang dilaksanakan pada tahun berkenaan sebagai satu kesatuan tahapan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Kemudian, untuk mencapai sasaran pembangunan daerah ditetapkanlah skala prioritas pembangunan daerah sebagai cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan pada tahun berkenaan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam suatu rangkaian kebijakan jangka menengah.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan/subkegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun optional sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Adapun, kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dalam mencapai visi dan misi Kepala daerah melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
- 2. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis Provinsi (RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Prioritas Nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP tahun 2022;
- 3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2022 di Kabupaten Tegal; serta
- 4. Pengembangan sektor atau bidang potensial yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

Pada awal tahun 2020 Indonesia mengalami bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) hal ini ditegaskan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Keputusan Presiden ini menyatakan bahwa:

- 1. Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) sebagai bencana nasional;
- 2. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

- (covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
- 3. Gubernur, Bupati/Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Hingga tahun 2021 pandemi covid-19 masih berlangsung dan masih cukup kuat merusak struktur ekonomi di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Tegal. Meskipun saat ini program vaksinasi mulai dilaksanakan, namun untuk mencapai *herd imunity*, untuk bisa menjangkau 75 persen vaksinasi populasi dengan dua dosis vaksin, Indonesia butuh waktu setidaknya 3-4 tahun. Dengan kondisi seperti itu maka dampak bencana ini kemungkinan berimbas pada pembangunan hingga tahun 2023 dengan skala dampak yang semakin menurun. Sehingga Tahun 2021-2022 ini masih diperlukan upaya pemulihan dampak pasca bencana covid-19 yang dituangkan dalam kebijakan/prioritas pembangunan tahun 2022 baik pada tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah.

Merujuk pada arahan/agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 maka pembangunan tahunan pemerintah pusat tahun 2022 (RKP 2022) mempunyai tema pembangunan Nasional: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", maka sasaran dan target nasional yang harus dicapai, antara lain:

Tabel 4. 1 Target Indikator Makro dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Outlook 2021	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%,yoy	-2,1	5	5,4 - 6
2	Laju Inflasi	%,yoy	2,6	1,5	2,0 - 4,0
3	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	%,yoy	1,3	5,1	7,1-7,6
4	Cadangan Devisa	(US\$ miliar)	135,9	136,1	138,2-141,5
5	Defisit Neraca Transaksi Berjalan	%, PDB	-0,4	-1	(1,6) - (1,7)
6	Penerimaan Perpajakan	%, PDB	8,3	8,2	8,3 - 8,4
7	Keseimbangan Primer	%, PDB	-4,2	-3,6	(2,6) - (3,2)
8	Surplus / Defisit APBN	%, PDB	-6,2	-5,7	(4,7) - (5,5)
9	Stok Utang Pemerintah	%, PDB	39,7	41,4	45,3-46,5
10	Peringkat kemudahan berusaha Indonesia/EODB	Peringkat	73	56	51
11	Pertumbuhan investasi	PMTB, %	-4,9	4,3	6,5 - 7,2
12	Realisasi investasi PMA dan PMDN	(Triliun, Rp)	826,3	858,5	968,4
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,07	5,9 - 6,5	5,5 - 6,2
14	Tingkat Kemiskinan	%	10,19	9,2 - 9,7	8,5 - 9,0
15	Gini Rasio	Poin	0,385	0,377 - 0,382	0,376 - 0,378
16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,94	72,7	73,44 - 73, 48
18	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	25,93	24,05	26,87

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Outlook 2021	Target 2022
19	Nilai Tukar Petani	%	101,65	102 - 104	102 - 104
20	Nilai Tukar Nelayan	%	100,22	102 - 104	102 - 105

Sumber: Bappenas, 2021

Ditahun 2020 pemulihan ekonomi dan reformasi struktural ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomo nasional mencapai 5,4-6,0 persen yang kemudian dapat meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi US\$ 4370 – 4400 ditahun 2022. Kondisi tersebut diharapkan dapat membawa Indonesia masuk kategori Upper-Middle Income Countries. Untuk mendukung beberapa pencapaian tersebut diperlukan dukungan stabilitas inflaso pada rentang 2,0-4,0 dengan nilai rupiah pada kisasan Rp. 13.900,00 - Rp. 15.000,00 per US\$.

Berbagai capaian kondisi makro dan stabilitas ekonomi yang terjaga kemudian dapat memberikan trickle down effects pada tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5 – 9,0 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 0,376 – 0,378 persen. Selain itu kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat dengan indikasi IPM naik menjadi 73,44 – 73,48, kesejahteraan petani dan nelayan meningkat dimana NTP mencapai 105 dan NTN pada range 102 – 105.

4.1.1. Arah Kebijakan RKP Tahun 2022

Keberhasilan pembangunan nasional ditahun 2022 menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi naSional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan melalui diversifikasi ekonomi terutama pada sector-sektor yang terdampak pandemin covid-19 dan mendorong sector potensial lainnya untuk tumvuh lebih cepat.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, maka kualitas daya saing perlu ditingkatkan melalui reformasi struktural.

1) Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha

- **a) Penuntasan krisis kesehatan**. Pengendalian pandemic covid-19 melalui program vaksinasi yang berdampak pada peningkatan keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk memulihkan aktivitas ekonomi kembali nomal.
- **b) Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha** khususnya UMKM untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sector yang terdampak besar khususnya pariwisata dan industri.
- c) Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga. Untuk itu bantuan social masih perlu digulirkan untuk membantu ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu diperlukan pelatihan prakerja yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja.
- **d)** Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekitar proyek sekaligus berkontribusi pada peningkatan investasi.

e) Program khusus diarahkan pada program lain yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat seperti kebijakan yang memastikan belajar mengajar murid di sekolah *(pembelajaran offline)* secara aman.

2) Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningaktan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian dan produksi pangan *(food estate)* yang ditransformasikan pada ekonomi digital dukungan kualitas infrastruktur dan layanan digital yang merata.

3) Reformasi Struktural

Reformasi structural dilakukan melalui reformasi ekonomi, reformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas SDM.

a) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu tumbuh 5,4-6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi ditopang peningkatan investasi dengan target pertumbuhan 6,5-7,2 persen dan ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 6,5-7,1 persen. Peningkatan investasi dan ekspor diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Konsumsi masyarakat diharapkan mengalami *rebound,* tumbuh mencapai 5,8 – 6,3 persen karena daya beli masyarakat meningkat dan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Konsumi pemerintahan diperkirakan tumbuh relative lambat 0,8-2,8 persen namun diharapkan tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Impor barang dan jasa juga diperkirakan akan tumbuh 7,8-8,9 persen sebagai indikasi penguatan aktivitas ekonomi domestik.

Dari sisi lapangan usaha sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang terkena dampak negative pandemi diharapkan segera pulih dengan kondisi global dan domestic yang diperkirakan sudah berangsur normal ditahun 2022. Pulihnya sector industry didorong oleh aktivitas produksi yang kembali menuju tingkat normal. Adapun factor-faktor pendorong pertumbuhan industry pengolahan ditahun 2020 antara lain: 1) keberlanjutan pertumbuhan subsector industry makanan, minuman dan farmasi,; 2) peningkatan investasi di subsector industri logam dasar, khususnya produksi baterai kendaraan listrik; 3) pulihnya ekspor produk manufaktur Indonesia ke mitra dagang utama; 4) Percepatan transisi sector industry pengolahan dalam beradaptasi dengan automasi, digitalisasi, dan perluasan penerapan industri hijau (Circular Economy).

Dalam rangka trasnformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (1) peningkatan kualitas SDM industry melalui re-sklilling dan upskilling tenaga kerja industry; (2) hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi teknologi maju dan orientasi ekspor, (3) peningkatan peran industry kecil dan menengah dalam rantai pasok domestik dan global; (4) perluasan penerapan industry 4.0 pada 6 subsektor prioritas, (5) peningkatan dan perluasan ekspor, (6) peningkatan standar kualitas, (7) konsolidasi logistic dan pemasaran yang didukung oleh digitalisasi.

Pemulihan sector pariwisata dilaksanakan melalui strategi (1) pemulihan pasar wisatawan melalui pemberian insentif paket wisata, MICE Pemerintah, dan pengembangan travel bubble bilateral dan regional; (2) pemulihan lapangan kerja melalui pemulihan tenaga kerja, pemulihan jam kerja serta re-hiring tenaga kerja; (3) pemulihan industry pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standard Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) di destinasi dan industry pariwisata, penyelesaian pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP); serta (4) pemulihan pariwisata Bali dan destinasi unggulan lainnya (Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi). Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (a) penguatan pasar pariwisata yang didukung pengembangan tourism hub, niche ourism package, pembuatan film di sebuah destinasi, bidding event minat khusus, MICE, sport tourism, dan pemanfaatan big data; (b) peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan destinasi dan desa wiisata, re-skilling dan upskilling tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif; (c) regenerasi kota warisan yang mendukung aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif; (d) penguatan konten dan kemasan dengan dukungan ekonomi kreatif; (e) peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung pengembagan geopark sebagai destinasi pariwisata.

- b) Tingkat Pengangguran Terbuka, Berbagai upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran covid-19, program vaksinasi, keberlanjutan stimulus fiscal dan moneter, implementasi reformasi structural seperti UU Cipta Kerja secara simultan dan bersama-sama diharapkan dapat menurunkan angka penganggutan hingga kisaran 5,5-6,2 persen ditahun 2022. Penciptakan kesempatan kerja baru ditargetkan dapat menyerap 2,3-2,8 juta tenaga kerja melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Upaya strategis lainnya antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kejra melalui reformasi system Pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan system informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakakerjaan, dan (3) penguatan system perlindungan social bagi pekerja.
- c) Tingkat Kemiskinan, Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8,5-9,0 persen dengan 2 (dua) syarat dan asumsi yaitu: (1) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan miksin, iklim investasi yang terjadai, serta infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi sasaran yang harus dicapai; (2) strategi dan arah kebijakan afirmasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk miksin dan rentan miskin terus dipertajam. Adapun strategi tersebut diterjemahan dalam arah kebijakan mencakup:

- Integrasi dan digitalisasi bantuan social non tunai;
- Penguatan fungsi pendamingan dalam melaksanakan program bantuan social serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku;
- Penguatan system jaminan social nasional (SDSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegasi;
- Penguatan system perlindungan social menjadi lebih adaptif;
- Peningkatan kesejahteraan social bagi kelompok rentan (anak, penyendang disabilitas, lanjut usia, kelompok tuna social, migran bermasalah dan korban perdagangan orang);
- Penguatan skema pendampingan dan layanan terpadu serta perluasan registrasi social ekonomi mencakup 70% populasi;
- Pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miksin dan rentan miskin.

d) Rasio Gini

Pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian target rasio gini menjadi 0,376-0,378. Pemerintah akan menyempurnakan intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalu reformasi system perlindungan social yang meliputi:

- Pengembangan registrasi social ekonomi;
- Peningkatan akurasi penargetan;
- Integrasi dan penyederhanaan program;
- Penyaluran secara digital, cepat dan responsive kebencanaan.

Selanjutnya penguatan kelembagaan pelatihan vokasi untuk memenuhi pasar kerja masa depan. Pengembangan UMKM sebagai salah stu penggeran utama ekonomi kelompok menengah, serta penguatan kebijakan fiscal untuk redistribusi secara merata.

e) Indeks Pembangunan Manusia

IPM ditahun 2022 ditargetkan mencapai 73,44-73,48 melalui:

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotive dan preventif, serta penguatan kapasitas system kesehatan di seluruh wilayah;
- Peningkatan pemerataan layann pendudukan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi, afirmasi akses di semua jenjang Pendidikan, percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
- Bantuan social dan subsisi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah dan insentif kepada dunia usaha untuk kelompok yang pendapatannya turun dan pengangguran.

f) Ekonomi Hijau

Pada tahun 2022 kegiatan perekonomian dan social diperkiarakan kembali bangkit dengan sasaran pertumbuhan sebesar 5,4-6,0 persen. Sementara itu program dan kegiatan pembangunan pemerintah tahun 2022 diperkirakan mulai memasuki fase pemulihan dan transisi menuju transformasi ekonomi. Dalam kondisi tersebut aksi pembangunan rendah karbon seperti reforestasi gambut, pengembangan EBT dan efisiensi energi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.

g) Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani dijaga pada range 102-104 melalui kebijakan yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan penciptaan nilai tambah pertanian melalui jaminan ketersediaan input pertanian, pembentukan korporasi petani dan nelayan, food estate (Kawasan sentra produksi pangan), pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital, efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas jalan usaha tani dan system logistic pangan, percepatan trasnformasi platform e-commerce pertanian/rantai pasok online, serta pengolahan primer produksi pangan dan pertanian.

h) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN dijaga pada kisaran 102-105 melalui: (1) peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan: (2) penguatan rantai pasok hasil perikanan; (3) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui kampung-kampung perikanan dan desa wisata bahari; (4) penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan termasuk pembentukan korporasi nelayan: (5) perlindungan bagi pelaku usaha perikanan: (6) pendampingan dan penyuluhan serta peningkatan padat karya.

Pencapaian target indicator Makro dan Sasaran Pembangunan Nasional ditahun 2022 didukung melalui 7 (tujuh) Prioritas Nasional antara lain:

- 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transfromasi pelayanan publik.

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian pembangunan wilayah Kabupaten Tegal sebagai bagian dan satu kesatuan pembangunan di lingkup Provinsi Jawa Tengah, maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keberhasilan pembangunan dari daerah Kab/Kota. Pembangunan pada tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah memiliki tema "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM". Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ditahun 2022 didasarkan pada 7 isu strategis yang menjadi focus pembangunan ditahun 2022 antara lain:

- 1. Penanggulangan Kemiskinan
- 2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
- 3. Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha
- 4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian SDA
- 5. Kedaulatan Pangan dan Energi
- 6. Kesenjangan Wilayah
- 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

Berdasarkan tema dan isu strategis Provinsi Jawa Tengah ditahun 2022 maka prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 antara lain:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana, yang difokuskan pada:

- a. Meningkatkan Produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani
- b. Perwuiudan korporasi Petani Meningkatkan Produksi dan kualitas hasil perikanan
- c. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan
- d. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industry kecil dan menengah;
- e. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat *(local based community)* dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah
- f. Pengembangan Daya Tarik wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada Kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pegangguran tinggi;
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
- i. Rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfataan potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu dnegan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- j. Konservasi lingkungan, pengendalian air sungai, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan;

- k. Peningkatan kapasitas tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung dan longstorage yang didukung perkuatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;
- l. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan banjir, rob, dan tanah longsor;
- m. Integrasi dokumen perencanaan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan;
- n. Sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan literasi bencana;
- o. Penguatan system peringatan dini dan kesiapsiagaan;
- p. Kemitraan kolaboratif serta peningkatan pembiayaan bersumber dari non pemerintah.

2. **Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran,** yang difokuskan pada:

- Penyediaan basic life acces untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok pertain, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya;
- b. Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat);
- c. Penguatan tata Kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan social (DTKS);
- d. Pengurangan penganggutan melalui startup wirausaha, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengawasan tenaga kerja.

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan secara luas;
- b. Pembangunan kesehatan melalui penguatan system kesehatan daerah, meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan Puskesmas dan pelayanan Rumah Sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan akses layanan dasar serta pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan perempuan dan anak.

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, yang difokuskan pada:

- a. Meningkatkan pelayanan public langsung kepada masyarakat (direct service) dan membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*);
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan:
- c. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Mewujudkan efisiiensi kelembagaan dan system manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik;
- e. Meningkatnya budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat;
- f. Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal;

- g. Meningkatkan edukasi tentang keberagaam, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat;
- h. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak *criminal* termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun target sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 antara lain:

- 1. Angka kemiskinan turun menjadai 11,42% 10,27%
- 2. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 5,96% 5,88%
- 3. Pertumbuhan ekonomi antara 3,93% 5,520%
- 4. Inflasi pada angka 3,0 ± 1
- 5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,43

4.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 4.3.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia"

Arti Visi:

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu

mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan

secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja

tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha

ekonomi lokalnya secara mandiri dan.

Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju,

optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata

yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong

yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang

teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter

kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila

dan spiritualitas keagamaan.

4.3.2. Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan *e-government* sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan *backlog* rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinIKMati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat

kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro-Growth Stategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit* 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan (*Enviromental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan konstribusi tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumberdaya manusia yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbangan untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja/organisasi merupakan satu kesatuan kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

4.3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif melayani Rakyat.

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE).
- b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- c. Meningkatnya pengelolan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.
- d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sasarannya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

2. Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.

Misi II memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

1) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap dengan indikator sasarannya yaitu Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap dan Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak.

- 2) Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan dengan indikator sasarannya Rasio Konektivitas Kabupaten.
- 3) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasarannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Misi III memiliki tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini memliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dengan indikator sasaran Laju PDRB sektor Pertanian.
- b. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dengan indikator sasaran Laiu PDRB Sektor Industri.
- c. Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dengan indikator sasaran Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.
- d. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Perdagangan.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi IV memliki 2 (dua) tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan.
 - 3) Meningkatnya Pemberdayaan Gender dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
 - 4) Meningkatnya Produktivitas Pemuda dengan indikator sasaran Wirausaha Muda Berbasis Kinerja Bisnis.
- b. Menekan Laju Kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin. Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :
 - 1) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
 - 2) Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.

5. Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal.

Misi V memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu:

a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Tujuan ini dapat diukur dengan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakan yang dapat diukur dengan indikator Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan.

- b. Menurunnya Resiko Bencana. Tujuan ini dapat diukur dengan Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana dengan indikator sasaran Indeks Kapasitas Daerah.
- c. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan sasaran indikator Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 4. 2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia

THILLIAN / CACADAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		Kondisi Akhir
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2020	2022	2023	2024	2024
MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, te	rbuka, akuntabel dan efektif melayani rak	yat				
Tujuan: 1.1 Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	63,69	64,69	65,19	65,69	65,69
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6
publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,61	82,15	84,83	86,2	86,2
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	63,61	67,61	70,61	73,61	73,61
Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Pengelolan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 1.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	72,24	76,42	78,31	80,56	80,56
MISI 2: Memperkuat daya saing daerah melalui per	nbangunan infrastruktur yang andal, berk	tualitas dan terintegras	si serta berwawas	an lingkungan		
Tujuan 2.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	70,17	77,73	80,04	82,12	82,12
Commence 2.1.1 Maria alatawa Informativalitan	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	71,45	80,09	82,12	83,78	83,78
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	67,11	74,23	79,41	84,8	84,8
Sasaran 2.1.2.Meningkatnya Sistem jaringan/konektivitas perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	75,2	75,3	75,4	75,5	75,5
Sasaran 2.1.3.Meningkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,05	55,33	55,48	55,83	55,83

THILLIAN / CACADAN	INDIVATOR	KONDISI AWAL		TARGET		Kondisi Akhir
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2020	2022	2023	2024	2024
MISI 3: Membangun perekonomian rakyat yang ko	okoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan					
Tujuan 3.1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	-1,46	3,59-5,20	4,2 - 5,35	4,85 - 5,45	4,85 - 5,45
Sasaran 3.1.1. eningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	2,18	2,75	2,87	3,23	3,23
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan	-0,46	1,56	2,74	3,78	3,78
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	1,85	1,99	2,23	2,33	2,33
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	-4,2	2,75	3,23	4,56	4,56
MISI 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manu	sia melalui penguatan layanan bidang pend	lidikan, kesehatan dar	n sosial dengan m	emanfaatkan ken	nujuan ilmu pen	getahuan dan teknologi
Tujuan 4.1. Mewujudkan sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,39	69,43	70,13	70,83	70,83
yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,85	87,03	87,12	87,21	87,21
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,546	0,556	0,558	0,56	0,56
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,794	0,801	0,802	0,804	0,804
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,3	70,16	70,8	71,4	71,4
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Produktifitas Pemuda	Jumlah wirausaha muda pemula berbasis kinerja	100	300	400	500	500
Tujuan 4.2. Menekan laju kemiskinan	Persentase penduduk miskin	8,14	8,45 - 8,12	8,35 - 8,05	8,25 - 7,89	8,25 - 7,89
Sasaran 4.2.1. Menurunnya Kedalaman dan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,08	0,98	0,82	0,78	0,78
Keparahan Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,19	0,15	0,12	0,10	0,10

THUMAN / CACADAN	INDIVATOR	KONDISI AWAL		TARGET		Kondisi Akhir
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2020	2022	2023	2024	2024
Sasaran 4.2.2. Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,82	10,21 - 9,42	10,12 - 9,14	9,85 - 8,85	9,85 - 8,85
MISI 5: Menciptakan tata kehidupan masyarakat ya	ang tertib, aman, tentram dan nyaman der	gan tetap menjaga dar	ı melestarikan nil	ai-nilai budaya se	erta kearifan lok	al
Tujuan 5.1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	82,66	86,00	88,00	90,00	90,00
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	82,66	86,66	88,66	90,66	90,66
Tujuan 5.2. Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	183	177,71	174,62	172,12	172,12
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,60	0,8	0,89	0,89	0,89
Tujuan 5.3. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persenstase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	44,74	55,27	63,16	73,69	73,69
Sasaran 5.3.1. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	57,5	65,5	70,5	75,5	75,5

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.3.4. Program Unggulan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;

Mewujudkan sebuah pelayanan yang mudah cepat dan transparan kepada masyarakat, melalui pelayanan satu pintu, diwujudkan dengan menciptakan satu pusat sistem layanan terpadu, merupakan muara dari berbagai sistem pelayanan yang tersebar di berbagai instansi dalam sebuah *mall* pelayanan publik.

2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;

Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan keterampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah, dan menumbuhkan kemampuan menakar peluang bisnis beserta dengan risikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang serta Pengembangan Wilayah;

Strategi yang akan dilakukan adalah pemeliharaan jalan antara lain dengan cara pendayagunaan mandor jalan dan unit reaksi cepat penambalan jalan untuk mengantisipasi secara cepat setiap kerusakan jalan yang terjadi dan pemilihan jenis konstruksi jalan yang lebih tahan terhadap kerusakan serta mulai melengkapi jalan dengan konstruksi drainase. Selain itu dilakukan pengembangan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kawasan yang progresif. Strategi yang dilakukan adalah mempersiapkan prasyarat *project-project* dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang.

4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin; Upaya pengurangan luas Kawasan kumuh merupakan upaya kolabaratif baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa dan para pihak swasta. Upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan Bantuan RTLH melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa RTLH. Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten adalah dengan Program Kampung Ora Kumuh. Diharapkan Dana Desa dari Pemerintah Desa juga fokus pada penanganan kumuh. Dengan upaya koloraborasi ini kawasan kumuh akan tuntas ditangani dengan cepat.

5. Penanganan Dampak Covid-19;

Penanganan dampak covid-19 tetap perlu dilakukan dalam periode perencanaan pasca tahun 2020. Penanganan dampak covid-19 dilakukan terhadap penangangan lanjutan covid-19 (kuratif) berupa upaya penjaminan kualitas kesehatan publik. Penanganan lanjutan covid-19 dilakukan dengan menjamin setiap penduduk Tegal yang terinfeksi atau berpotensi terinfeksi. Pemulihan sosial pasca covid-19 dilakukan melalui upaya pemenuhan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*). Sementara pemulihan ekonomi pasca covid-19 dilakukan melalui kebijakan khususnya terkait stimulus ekonomi

masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingg kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan. Transformasi ekonomi wilayah potensial melalui digitalisasi ekonomi, kolaborasi ekonomi hingga inovasi implementasi budaya kerja baru (new normal).

6. Penataan Kota Slawi;

Secara jaringan infrastruktur transportasi, Kota Slawi terdiri dari 9 koridor utama. Penataan Kota Slawi selain harus memberikan makna pada kota (*city branding*), juga harus memperhatikan 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Aspek Aksesibilitas meliputi jaringan jalan, jaringan, drainase dan prasarana sarana utilitas (PSU). Aspek Amenitas meliputi kelengkapan jalan seperti jalur, rabu, parking area dan taman untuk menambah keindahan dan identitas sebuah koridor. Sedangkan aspek atraksi meliputi kelengkapan dan atraksi serta aktifitas manusia untuk mengisi ruang – ruang yang telah sediakan. Pada RPJMD perubahan penataan kota slawi akan focus pada 2 Koridor, yaitu koridor 1 dan 2 yang lebih diwarnai sebagai pusat pemerintah dan ruang public. Diharapkan dengan Penataan Kota Slawi akan dapat memberikan kemanfaatan pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga Kota Slawi.

Dalam RKPD 2022 secara riil penataan kota slawi berupa pembangunan dan rehabilitasi jalan lengkap dengan drainase dan median jalan dengan hiasan desain sarpras pendukung yang memiliki nilai estetika.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Peningkatkan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, penanganan sampah dilakukan dengan penyediaan armada, TPS, TPS Terpadu dan Pembuatan TPA baru dengan sistem sanitary landfill, sedangkan pengurangan sampah dilakukan dengan upaya pengurangan sampah difokuskan untuk mengurangai sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan untuk mengurangi beban sampah yang dibuang ke TPA. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik dan anorganik melalui pendekatan 3R yaitu reduse, reuse dan recycle adalah hal yang harus segera dilaksanakan agar dilakukan dengan penyelenggaraan, salah satunya dengan Program Desa Merdeka Sampah. Program Desa Merdeka sampah merupakan program yang didesain sebagai bantuan keuangan kepada desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga akan mengurangi timbulan sampah.

8. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Dalam penguatan integritas, seluiruh aspek perlu dikuatkan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. penekanan dalam penguatan integritas pemerintahan adalah bagaimana bisa *smart* dalam berpemerintahan. Penguatan seluruh aspek integritas harus bermuatan *Smart*. Oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi salah satu prasyarat akselerasi penguatan integritas ini antara lain dalam penerapan *e-office* dalam aspek tata kerja pemerintahan.

9. Pembinaan Olahraga, Pemberdayaan Pemuda dan Pelestarian Budaya;

Pembinaan olahraga diarahkan dengan memberikan sebesar besarnya kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mewujudkan cita citanya menjadi olahragawan yang andal dan profesional, yang bisa menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Tegal. Program ini dilakukan dengan upaya

memberikan perhatian kepada olahragawan serta memberikan insentif dan penghargaan kepada atlet yang layak sesuai prestasinya. Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk mengoptimalkan kepeloporan pemuda dan pengembangan pemuda kreatif. Sementara pelestarian budaya diarahkan pada upaya pelestarian, pemajuan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adatistiadat, permainan tradisional, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa dan ritus, hingga cagar budaya.

4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 disusun berdasarkan isu strategis actual yang kemungkinan terjadi ditahun 2022 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2021 sampai dengan tahun berjalan dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta RKP dan program strategis nasional Tahun 2022 sebagai satu kesinambungan integrasi pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah.

4.4.1. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah, RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 disusun dengan:

- 1. Memedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Memedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keudangan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:
- 5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 7. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10. Memperhatikan pokok-pokok kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2022;

- 11. Memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2022;
- 12. Memedomani sasaran dan prioritas tahunan sebagaimana terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 triwulan ke-II;
- 13. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 14. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDGs) Tahun 2016-2030;
- 15. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* yang terukur;
- 16. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;
- 17. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk menjamin afirmasi pembangunan yang responsif gender.

4.4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022

Pada dasarnya RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 merupakan penjabaran dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dengan memedomani sasaran dan prioritas kebijakan tahun berkenaan. Meskipun begitu RKPD juga harus responsive terhadap kondisi actual yang terkini sebagai penyempurna sasaran dan prioritas RPJMD tahun berkenaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu isu strategi pembangunan yang mungkin masih dan akan terjadi di tahun 2022 harus teridentifikasi dan tertangani dalam muatan kebijakan RKPD ini. Adapun isu strategis Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Tahun 2022

No	Isu Strategis Kabupaten Tegal	Isu Strategis Provinsi
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah
2	Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian SDA
3	Kualitas Sumber Daya Manusia	Kesenjangan Wilayah Peningkatan Kualitas dan Daya Saing
3	Ruantas Sumber Daya Manusia	SDM
4	Menekan Laju Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan

No	Isu Strategis Kabupaten Tegal	Isu Strategis Provinsi
5	Menekan Laju Pengangguran	Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan
6	Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan	Kesempatan Berusaha
	Pangan	Kedaulatan Pangan dan Energi

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 diarahkan untuk "PENGUATAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL - EKONOMI DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR YANG DIDUKUNG SDM-PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL". Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan difokuskan pada penguatan sosial-ekonomi yang baru pulih akibat dampak covid-19 sekaligus menjadi tindak lanjut dari arah kebijakan tahun sebelumnya. Oleh karena itu berbagai kebijakan tahun 2021 masih mewarnai ditahun 2022 dengan penekanannya pada aspek penguatan. Pembangunan infrastruktur dasar mulai diakselerasi dan ruang kota mulai ditata dalam kerangka yang berkelanjutan. Untuk mendukung percepatan penguatan transformasi tersebut maka perlu didukung SDM dan tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2022 antara lain:

1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK, fokus kebijakan pada:

- a. Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan
- b. Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
- c. Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran
- d. Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
- e. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- f. Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem

2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup, fokus kebijakan pada:

- a. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
- b. Penataan ruang kota dan permukiman
- c. Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan

3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:

- a. Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
- b. Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
- c. Penguatan dan diversifikasi pangan
- d. Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan
- e. penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan
- f. Pengembangan SDM pariwisata kreatif
- g. Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
- h. Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital

- i. Penyehatan dan pengembangan koperasi
- j. Pemulihan dan pengembangan UMKM

4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru, fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
- b. Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
- c. Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru

5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; <u>fokus kebijakan pada</u>:

- a. Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
- b. Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
- c. Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda

6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
- b. Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
- c. Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat

7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
- b. Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja

Adapun keterkaitan Isu Stretegis, Prioritas Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan Pioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 4 Keterkaitan Prioritas Daerah Kabupaten Tegal dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2022

Isu Strategis Daerah 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Memperkuat
Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi Taknologi Tik	peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	stabilitas polhukhankam dan transfromasi pelayanan public	
Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan

Isu Strategis Daerah 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
	kualitas lingkungan hidup	memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan	ekonomi dan pelayanan dasar
		ketahanan bencana	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
Kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
Menekan Laju Kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Penguatan percepatan pengurangan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi
Menekan Laju Pengangguran	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	kemiskinan dan pengangguran	kesenjangan dan menjamin pemerataan

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.4.4. Sasaran Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022

Sasaran pembangunan RKPD tahun 2022 berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 fokus pada 16 prioritas sasaran pembangunan antara lain:

1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang ditandai dengan peningaktan Indeks SPBE menjadi 2,4 dan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 82,15;

- 2) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja yang ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP Kabupaten menjadi 67,61;
- 3) Meningkatnya Pengelolan Keuangan Daerah yang ditandai dengan Opini BPK yang masih WTP:
- 4) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang ditandai dengan peningkatan Indeks ASN menjadi 76,42;
- 5) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap yang ditandai dengan peningkatan persentase infrastruktur PU yang mantap menjadi 80,09% dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak menjadi 74,23%;
- 6) Meningkatknya Kualitas Lingkungan Hidup yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 55,33;
- 7) Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian yang ditandai dengan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Pertanian sebesar 2,75%;
- 8) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Industri sebesar 1,56%;
- 9) Meningkatnya Produktifitas Pariwisata yang ditandai dengan peningkatan Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten menjadi 1,99%
- 10) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Perdagangan sebesar 2,75%;
- 11) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pendidikan menjadi 0,556 poin;
- 12) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kesehatan menjadi 0,801 poin;
- 13) Meningkatnya Pemberdayaan Gender yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 70,16;
- 14) Meningkatnya Produktifitas Pemuda yang ditandai dengan peningkatan Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja sejumlah 300 wirausaha;
- 15) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang ditandai dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 0,98 dan Indeks Keparaha Kemiskinan menjadi 0,15;
- 16) Menekan Laju Tingkat Pengangguran yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menjadi 10,21%-9,42%

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
	Meningkatnya	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan	Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan
1	Kualitas Pelayanan Publik	efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja		Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
3	Meningkatnya Pengelolan Keuangan Daerah		Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah		Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
5	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta	Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah Penataan ruang kota dan permukiman
6	Meningkatknya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
7	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim	Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan Penguatan dan diversifikasi pangan
8	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	investasi ramah lingkungan	Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif
9	Meningkatnya Produktifitas Pariwisata		penguatan dan pengembangan destinasi wisata Pengembangan SDM pariwisata kreatif

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
10	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan		Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital Penyehatan dan pengembangan koperasi
11	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan		Pemulihan dan pengembangan UMKM Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
12	Masyarakat Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
13	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
14	Meningkatnya Produktifitas Pemuda	berbasis genuer	Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
15	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
16	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Guna mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, ditetapkan program pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 4. 6 Sasaran, Prioritas Daerah dan Program Pembangunan Prioritas Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan Informasi	40,62	50,00	224.109	DINAS KOMINFO
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	25,00	50,00	1.800.000	DINAS KOMINFO
					Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	16,67	70,83		DINAS KOMINFO
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00	65,00		DINAS KOMINFO
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	20,00	30,00	1.500.000	DINAS KOMINFO

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Adiwerna	76,37	78,87	45.000	KECAMAT AN ADIWERNA
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	79,29	81,79	45.000	KECAMAT AN BALAPULA NG
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	79,62	82,12	45.000	KECAMAT AN BOJONG
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bumijawa	87,53	90,03	45.000	KECAMAT AN BUMIJAWA
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhwaru	79,37	81,87	45.000	KECAMAT AN DUKUHTU RI
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	77,44	79,94	45.000	KECAMAT AN DUKUHWA RU

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Jatinegara	79,70	82,20	45.000	KECAMAT AN JATINEGA RA
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kedungbanteng	82,00	84,00	45.000	KECAMAT AN KEDUNGA BNTENG
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kramat	78,98	81,48	45.000	KECAMAT AN KRAMAT
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Lebaksiu	77,25	81,25	45.000	KECAMAT AN LEBAKSIU
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Margasari	77,40	79,90	45.000	KECAMAT AN MARGASA RI
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pagerbarang	77,63	80,13	45.000	KECAMAT AN PAGERBAR ANG

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pangkah	78,74	81,24	45.000	KECAMAT AN PANGKAH
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Slawi	79,67	82,17	45.000	KECAMAT AN SLAWI
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Suradadi	79,76	82,26	45.000	KECAMAT AN SURADADI
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Talang	73,20	75,70	45.000	KECAMAT AN TALANG
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	80,55	83,05	45.000	KECAMAT AN TARUB
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Warureja	77,40	79,90	45.000	KECAMAT AN WARUREJ A

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Adiwerna	0,00	0,00	120.000	KECAMAT AN ADIWERNA
					Persentase desa Maju Kecamatan Adiwerna	9,52	9,52		KECAMAT AN ADIWERNA
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	0,00	5,00	120.000	KECAMAT AN BALAPULA NG
					Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	5,00	9,52		KECAMAT AN BALAPULA NG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	12,00	0,12	120.000	KECAMAT AN BOJONG
					Persentase desa maju Kecamatan Bojong	0,29	0,29		KECAMAT AN BOJONG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bumijawa	0,00	0,00	120.000	KECAMAT AN BUMIJAWA

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase desa maju Kecamatan Bumijawa	11,11	16,67		KECAMAT AN BUMIJAWA
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhwaru	0,00	0,00	120.000	KECAMAT AN DUKUHTU RI
					Persentase desa maju Kecamatan Dukuhwaru	10,00	10,00		KECAMAT AN DUKUHTU RI
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhturi	0,00	0,00	120.000	KECAMAT AN DUKUHWA RU
					Persentase desa maju Kecamatan Dukuhturi	5,56	5,56		KECAMAT AN DUKUHWA RU
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara	0,00	6,00	120.000	KECAMAT AN JATINEGA RA
					Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara	6,00	12,00		KECAMAT AN JATINEGA RA

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,10	120.000	KECAMAT AN KEDUNGA BNTENG
					Persentase desa maju Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,00		KECAMAT AN KEDUNGA BNTENG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Kramat	0,00	5,26	1.391.753	KECAMAT AN KRAMAT
					Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Kramat	16,00	16,00		KECAMAT AN KRAMAT
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Lebaksiu	7,69	7,69	120.000	KECAMAT AN LEBAKSIU
					Persentase desa Maju Kecamatan Lebaksiu	15,00	15,00		KECAMAT AN LEBAKSIU
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Margasari	8,00	8,00	120.000	KECAMAT AN MARGASA RI

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase desa maju Kecamatan Margasari	46,00	46,00		KECAMAT AN MARGASA RI
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	0,00	0,00	120.000	KECAMAT AN PAGERBAR ANG
					Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	8,00	16,00		KECAMAT AN PAGERBAR ANG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Pangkah	0,00	0,00	120.000	KECAMAT AN PANGKAH
					Persentase desa Maju Kecamatan Pangkah	4,00	4,00		KECAMAT AN PANGKAH
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi	0,00	20,00	5.088.469	KECAMAT AN SLAWI
					Persentase desa maju Kecamatan Slawi	60,00	60,00		KECAMAT AN SLAWI

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Suradadi	0,00	0,00	120.000	KECAMAT AN SURADADI
					Persentase desa maju Kecamatan Suradadi	9,00	18,00		KECAMAT AN SURADADI
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Talang	0,00	0,00	120.000	KECAMAT AN TALANG
					Persentase desa maju Kecamatan Talang	0,00	5,26		KECAMAT AN TALANG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	0,00	0,00	120.000	KECAMAT AN TARUB
					Persentase desa maju Kecamatan Tarub	20,00	20,00		KECAMAT AN TARUB
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Warureja	0,00	8,00	120.000	KECAMAT AN WARUREJ A

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase desa/kelurahan Maju Kecamatan Warureja	17,00	17,00		KECAMAT AN WARUREJ A
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	35,00	68,00	5.128.000	DISPERMA SDES
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	15,00	30,00	130.000	DISDUKCA PIL
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	91,67	94,00	3.068.977	DISDUKCA PIL
					Perekaman KTP elektronik	99,68	99,74		DISDUKCA PIL
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	21,80	60,00		DISDUKCA PIL
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran	93,10	95,50	145.000	DISDUKCA PIL
					Persentase penduduk ber akta kematian	68,54	70,04		DISDUKCA PIL
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten		Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100,00	100,00	1.199.500	BAPPEDA DAN LITBANG

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	75,00	75,00		BAPPEDA DAN LITBANG
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	91,22	91,56	1.885.000	BAPPEDA DAN LITBANG
					Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	92,88	93,12		BAPPEDA DAN LITBANG
					Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93,02	93,24		BAPPEDA DAN LITBANG
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD Rumpun Perekonomian dan pembangunan tercapai LKJIP	9,00	30,00	773.232	SEKRETAR IAT DAERAH
					Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tecapai BAIK	100,00	100,00		SEKRETAR IAT DAERAH
					Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	1,00	3,00		SEKRETAR IAT DAERAH

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
			Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	65,00	72,50	1.318.771	BAPPEDA DAN LITBANG
Meningkatnya Pengelolan Keuangan Daerah	Opini BPK		Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	100,00	100,00	2.576.740	BPKAD
					Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	100,00	100,00		BPKAD
					Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	100,00	100,00		BPKAD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	14,09	15,06	2.524.167	BAPPENDA
					Rasio Piutang Pajak Daerah	66,26	95,00		BAPPENDA
					Rasio Pajak Daerah	30,63	30,52		BAPPENDA
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	62,50	70,00	3.474.277	BPKAD
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	91,70	92,00	764.240	INSPEKTO RAT
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	100,00	100,00		INSPEKTO RAT

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	39,02	60,00		INSPEKTO RAT
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	16,67	16,67	712.000	INSPEKTO RAT
					Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	60,41	66,66		INSPEKTO RAT
					Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	81,25	85,41		INSPEKTO RAT
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,12	0,12	4.000.000	BKD
					Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	87,97	94,77		BKD
					Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	35,76	41,82		BKD
					Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	110,04	259,85		BKD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Rasio pegawai fungsional (%)	9,87	15,28		BKD
					Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93,50	93,26		BKD
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	47,49	70,00	2.410.395	BKD
					Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	33,40	40,00		BKD
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	58,86	61,33	6.000.000	DPU
		3 3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	63,32	6.611.202	DPU
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	58,42	61,79	11.050.000	DPU

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
			Penataan ruang kota dan permukiman	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	0,3	60	45.900.000	DPU
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	76,88	79,12	43.026.555	DPU
					Rasio bangunan yang memiliki IMB	6,50	8,01		DPU
				PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	81,11	84,00	84.000.000	DPU
					Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	88,05	91,00		DPU
				PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	79,93	88	600.000	DPU
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	55,23	65,23	1.970.000	DISPERMA SDES
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	69,40	70,82	75.000	DISPERMA SDES
	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	2.415.075	DINAS PERKIMTA
					Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100,00	100,00		DINAS PERKIMTA
				PROGRAM PERUMAHAN DAN	Persentanse Penanganan	13,06	17,98	8.520.000	DINAS PERKIMTA

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan Tidak Layak Huni				
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	35,47	45,72	4.600.000	DINAS PERKIMTA
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU perumahan	83,31	84,50	14.300.000	DINAS PERKIMTA
Meningkatknya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	3,70	7,41	2.220.812	DLH
				KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1,08	9,76		DLH
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	0	34,72	350.000	DLH
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN GUMBAH BAHAN	Persentase Penanganan Limbah B3	60,00	62,50	275.000	DLH

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	95,57	2.749.320	DPU
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	47,29	52,08	10.405.000	DLH
					Persentase Pengurangan Sampah	14,00	17,92		DLH
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	78,00	82,00	14.166.000	DPU
Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	1.964.378	2.003.862	759.538	DKPP
					Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	13.608.184	13.881.708		DKPP
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing	11,11	55,56	145.144	DKPP
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	2.730.262	2.764.493	2.193.469	DKPP

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	145.642.227	148.291.680		DKPP
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan	5.478.639	5.492.344	231.953	DKPP
					Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	131.189.142	131.517.312		DKPP
			Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi daging (kg)	11.284.734	11.511.557	1.058.596	DINAS TAN KP
					Produksi Telur (kg.)	10.760.493	10.976.779		DINAS TAN KP
					Produksi Susu (kg.)	604.664	616.818		DINAS TANKP
					Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	89,80	89,90	1.002.596	DINAS TAN KP
					Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	63,00	65,00		DINAS TAN KP
					Luas Lahan Pertanian Organik	2,00	2,00		DINAS TAN KP
					Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	62,72	62,98		DINAS TAN KP
					Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	15,51	16,98		DINAS TAN KP

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman	1,52	1,62	10.058.374	DINAS TAN KP
					Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	2,60	3,34		DINAS TAN KP
					Luas Lahan Sawah Lestari	100,00	100,00		DINAS TAN KP
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	< 2,5	< 2,5	90.000	DINAS TAN KP
					Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	0,00	1,5		DINAS TAN KP
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	31,37	5,60	288.250	DINAS TAN KP
					Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	100	100		DINAS TAN KP
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	0	27	379.760	DINAS TAN KP

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	0,00	2,51		DINAS TAN KP
			Penguatan dan diversifikasi pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase penguatan cadangan pangan	26,50	28,50	222.200	DINAS TAN KP
					Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	48,00	50,00		DINAS TAN KP
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	72,00	90,00	37.768	DINAS TAN KP
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri		Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	60,00	70,00	800.000	DISPERINA KER
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOT A	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menegah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	17.929	DISPERINA KER
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	20,00	60,00	34.080	DISPERINA KER

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten		penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	78,33	85	4.980.000	DINAS PORAPAR
					Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	69,00	79,00		DINAS PORAPAR
			Pengembangan SDM pariwisata kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	50	65	900.000	DINAS PORAPAR
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan		Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar direhabilitasi	50,00	65,38	2.500.000	DINAS DAGKOP UKM
					Persentase pasar e- ritribusi	7,69	46,15		DINAS DAGKOP UKM
					Persentase Sarana dan Prasaran Pendistribusian yang terkelola dengan baik	100,00	100,00		DINAS DAGKOP UKM
			Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	2	2,00	150.000	DINAS DAGKOP UKM
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Laju Nilai Ekspor	1	1,00	-	DINAS DAGKOP UKM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi bermitra	1,04	3,64	35.000	Disdagkop UMKM

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
			Pemulihan dan pengembangan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	2,63	4,21	90.000	DINAS DAGKOP UKM
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kumulatif; IKU OPD	240133,00	1	631600
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,86	79,88	247.572.56	DINAS DIKBUD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,27		DINAS DIKBUD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan dasar	107,03	100		DINAS DIKBUD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan menengah	105,99	100,00		DINAS DIKBUD
					Rata-rata Nilai Kelulusan SD	77.47	76		DINAS DIKBUD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	70.86	73.36		DINAS DIKBUD
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Kelas PAUD	23,00	22,00	33.807.633	DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Kelas TK	3,16	4,61		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Kelas SD	19:11	1.40		DINAS DIKBUD
					Guru Mapel PAI	3.00	2.40		DINAS DIKBUD
					Guru Mapel PJOK	2.90	2.40		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Mapel SMP	04:38	20:19		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Mapel Paket A	06:14	06:14		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Mapel Paket B	22:44	22:44		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Mapel Paket C	18:14	18:14		DINAS DIKBUD
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,092	0,096	5.764.435	DINAS KESEHATA N
					Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,90	100,00		DINAS KESEHATA N
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	98,00		DINAS KESEHATA N

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	100,00		DINAS KESEHATA N
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00		DINAS KESEHATA N
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	91,00		DINAS KESEHATA N
					Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	55,00		DINAS KESEHATA N
					Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	30,00		DINAS KESEHATA N
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	56,00		DINAS KESEHATA N

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	30,00		DINAS KESEHATA N
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	79,00		DINAS KESEHATA N
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	70,00		DINAS KESEHATA N
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,10	70,00		DINAS KESEHATA N
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,50	95,00		DINAS KESEHATA N
					Cakupan balita stunting	12,50	12,30		DINAS KESEHATA N
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	42,00	63,00		DINAS KESEHATA N

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	100	100	26.975.560	RSUD dr SOESELO
					Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo	78,46 (AA)	82 (AA)	137.990.86 4	RSUD dr SOESELO
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	100	100	5.838.651	RSUD SURADADI
					Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	74,06 (A)	76,16 (A)	22.075.000	RSUD SURADADI
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100,00	100,00	120.000	DINAS KESEHATA N
					Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	83,00	89,60		DINAS KESEHATA N
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	30	36,00	820.971	DINAS KESEHATA N

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100		DINAS KESEHATA N
			Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	95,4	96	267.000	DINAS KESEHATA N
Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender	PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	26,84	28,00	87.400	DINAS P3AP2KB
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,06	-	DINAS P3AP2KB
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	50,00	64,00	-	DINAS P3AP2KB
Meningkatnya Produktifitas Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis		Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,135	2.050.000	DINAS PORAPAR
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,071		DINAS PORAPAR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	32,44	66,25	438.335	DINAS SOSIAL
			Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	29,39	62,62	2.003.750	DINAS SOSIAL
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	97,99	99,21	957.011	DINAS SOSIAL
			Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	100,00	100,00	905.000	DISPERMA SDES
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	21,58	21,79	975.462	DINAS P3AP2KB

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	50.000	DISPERINA KER
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	37.990,00	40.737,000	732.000	DISPERINA KER
					Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	5,50		DISPERINA KER
			Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	0,00	42,86	170.357	DINAS PMPTSP
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	100,00	20,00	316.250	DINAS PMPTSP
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	100	100	536.311	DINAS PMPTSP
		Vahungtan Tagal		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan	61,28	67,28	330.000	DINAS PMPTSP

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.5. Dukungan Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Berikut disajikan keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Provinsi dengan Prioritas Daerah, fokus kebijakan dan kabupaten dan program pembangunan prioritas tahun 2022.

Tabel 4.7 Dukungan Pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Melalui Prioritas Pembangunan Daerah, Fokus Kebijakan dan Program Pembangunan Prioritas RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program penyelenggaraa n persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi	40,62	50,00	224.109	Dinas Kominfo
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas	Percepatan difusi tik pada seluruh aspek	Program aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan tik dalam digitalisasi pemerintahan	25,00	50,00	1.800.000	Dinas Kominfo
transfromasi pelayanan publik	peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	pembangunan yang inovatif dan berbasis tik	pemerintaĥan		Persentase opd yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	16,67	70,83		Dinas Kominfo
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00	65,00		Dinas Kominfo

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program informasi dan komunikasi public	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	20,00	30,00	1.500.000	Dinas Kominfo
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan adiwerna	76,37	78,87	45.000	Kecamatan Adiwerna
			Perbaikan dan penataan sistem	Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan balapulang	79,29	81,79	45.000	Kecamatan Balapulang
			pelayanan prima kepada masyarakat	Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan bojong	79,62	82,12	45.000	Kecamatan Bojong
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan bumijawa	87,53	90,03	45.000	Kecamatan Bumijawa

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan dukuhwaru	79,37	81,87	45.000	Kecamatan Dukuhturi
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan dukuhturi	77,44	79,94	45.000	Kecamatan Dukuhwaru
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan jatinegara	79,70	82,20	45.000	Kecamatan Jatinegara
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan kedungbanteng	82,00	84,00	45.000	Kecamatan Kedungabnte ng
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan kramat	78,98	81,48	45.000	Kecamatan Kramat
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan lebaksiu	77,25	81,25	45.000	Kecamatan Lebaksiu
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan margasari	77,40	79,90	45.000	Kecamatan Margasari

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan pagerbarang	77,63	80,13	45.000	Kecamatan Pagerbarang
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan pangkah	78,74	81,24	45.000	Kecamatan Pangkah
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan slawi	79,67	82,17	45.000	Kecamatan Slawi
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan suradadi	79,76	82,26	45.000	Kecamatan Suradadi
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan talang	73,20	75,70	45.000	Kecamatan Talang
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan tarub	80,55	83,05	45.000	Kecamatan Tarub
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan warureja	77,40	79,90	45.000	Kecamatan Warureja

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan adiwerna	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Adiwerna
					Persentase desa maju kecamatan adiwerna	9,52	9,52		Kecamatan Adiwerna
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan balapulang	0,00	5,00	120.000	Kecamatan Balapulang
					Persentase desa maju kecamatan balapulang	5,00	9,52		Kecamatan Balapulang
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan bojong	12,00	0,12	120.000	Kecamatan Bojong
					Persentase desa maju kecamatan bojong	0,29	0,29		Kecamatan Bojong
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan bumijawa	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Bumijawa
					Persentase desa maju kecamatan bumijawa	11,11	16,67		Kecamatan Bumijawa

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan dukuhwaru	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Dukuhturi
					Persentase desa maju kecamatan dukuhwaru	10,00	10,00		Kecamatan Dukuhturi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan dukuhturi	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Dukuhwaru
					Persentase desa maju kecamatan dukuhturi	5,56	5,56		Kecamatan Dukuhwaru
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan jatinegara	0,00	6,00	120.000	Kecamatan Jatinegara
					Persentase desa maju kecamatan jatinegara	6,00	12,00		Kecamatan Jatinegara
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan kedungbanteng	0,00	0,10	120.000	Kecamatan Kedungabnte ng
					Persentase desa maju kecamatan kedungbanteng	0,00	0,00		Kecamatan Kedungabnte ng

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan mandiri kecamatan kramat	0,00	5,26	1.391.753	Kecamatan Kramat
					Persentase desa/kelurahan maju kecamatan kramat	16,00	16,00		Kecamatan Kramat
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan lebaksiu	7,69	7,69	120.000	Kecamatan Lebaksiu
					Persentase desa maju kecamatan lebaksiu	15,00	15,00		Kecamatan Lebaksiu
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan margasari	8,00	8,00	120.000	Kecamatan Margasari
					Persentase desa maju kecamatan margasari	46,00	46,00		Kecamatan Margasari
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan pagerbarang	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Pagerbarang
					Persentase desa maju kecamatan pagerbarang	8,00	16,00		Kecamatan Pagerbarang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan pangkah	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Pangkah
					Persentase desa maju kecamatan pangkah	4,00	4,00		Kecamatan Pangkah
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan slawi	0,00	20,00	5.088.469	Kecamatan Slawi
					Persentase desa maju kecamatan slawi	60,00	60,00		Kecamatan Slawi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan suradadi	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Suradadi
					Persentase desa maju kecamatan suradadi	9,00	18,00		Kecamatan Suradadi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan talang	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Talang
					Persentase desa maju kecamatan talang	0,00	5,26		Kecamatan Talang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan tarub	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Tarub
					Persentase desa maju kecamatan tarub	20,00	20,00		Kecamatan Tarub
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan mandiri kecamatan warureja	0,00	8,00	120.000	Kecamatan Warureja
					Persentase desa/kelurahan maju kecamatan warureja	17,00	17,00		Kecamatan Warureja
				Program administrasi pemerintahan desa	Persentase tertib dan baik administrasi pengelolaan keuangan dan asset desa	35,00	68,00	5.128.000	Dispermasdes
				Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase opd yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	15,00	30,00	130.000	Disdukcapil

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pendaftaran penduduk	Persentase penduduk ber kartu keluarga	91,67	94,00	3.068.977	Disdukcapil
					Perekaman ktp elektronik	99,68	99,74		Disdukcapil
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki kia	21,80	60,00		Disdukcapil
				Program pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran	93,10	95,50	145.000	Disdukcapil
					Persentase penduduk ber akta kematian	68,54	70,04		Disdukcapil
			Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan	100,00	100,00	1.199.500	Bappeda dan litbang
		dan penganggaran		Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	75,00	75,00		Bappeda dan litbang	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan rumpun bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	91,22	91,56	1.885.000	Bappeda dan litbang
					Tingkat keselarasan dokumen perencanaan rumpun bidang perekonomian dan sda	92,88	93,12		Bappeda dan litbang
					Tingkat keselarasan dokumen perencanaan rumpun bidang infrastruktur dan kewilayahan	93,02	93,24		Bappeda dan litbang
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase opd rumpun perekonomian dan pembangunan tercapai lkjip	9,00	30,00	773.232	Sekretariat daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase proses pemilihan pengadaan barang dan jasa tecapai baik	100,00	100,00		Sekretariat daerah
					Level tingkat maruritas ukpbj terpenuhi	1,00	3,00		Sekretariat daerah
			Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	65,00	72,50	1.318.771	Bappeda dan litbang
				Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan apbd	100,00	100,00	2.576.740	Bpkad
			Peningkatan pengawasan, akuntabilitas		Persentase ketepatan waktu penerbitan sp2d	100,00	100,00		Bpkad
			dan transparasi pengelolaan keuangan dan aset daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan peraturan daerah & peraturan bupati pertanggungjaw aban APBD	100,00	100,00		Bpkad

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio pad	14,09	15,06	2.524.167	Bappenda
					Rasio piutang pajak daerah	66,26	95,00		Bappenda
					Rasio pajak daerah	30,63	30,52		Bappenda
				Program pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan laporan bmd yang baik dan tepat waktu	62,50	70,00	3.474.277	Bpkad
				Program penyelenggaraa n pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	91,70	92,00	764.240	Inspektorat
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi	100,00	100,00		Inspektorat
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat kabupaten	39,02	60,00		Inspektorat

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase predikat wbk/wbbm berdasarkan penilaian internal	16,67	16,67	712.000	Inspektorat
					Persentase pemenuhan iku perangkat daerah	60,41	66,66		Inspektorat
					Persentase pd menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	81,25	85,41		Inspektorat
				Program kepegawaian daerah	Persentase asn yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,12	0,12	4.000.000	BKD
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan			Penguatan kapasitas asn dan penerapan merit sistem		Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	87,97	94,77		BKD
					Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	35,76	41,82		BKD

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%)	110,04	259,85		BKD
					Rasio pegawai fungsional (%)	9,87	15,28		BKD
					Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93,50	93,26		BKD
				Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase pns yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	47,49	70,00	2.410.395	BKD
					Persentase pns mengikuti seminar/ workshop/sejeni s sesuai dengan tupoksi jabatan	33,40	40,00		BKD
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta peningkatan kualitas	Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik pada daerah irigasi (di) kewenangan kabupaten	58,86	61,33	6.000.000	DPU

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
	hidup dan pemantapan ketahanan bencana	lingkungan hidup		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan akses layanan air minum	61,09	63,32	6.611.202	DPU
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan kabupaten	58,42	61,79	11.050.000	DPU
				Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	0,3	60	45.900.000	DPU
				Program penataan bangunan Gedung	Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	76,88	79,12	43.026.555	DPU
			Penataan ruang		Rasio bangunan yang memiliki imb	6,50	8,01		DPU
			kota dan permukiman	Program penyelenggaraa n jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	81,11	84,00	84.000.000	DPU
					Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	88,05	91,00		DPU
				Program penyelenggaraa n penataan ruang	Rasio kepatuhan terhadap itr yang diajukan	79,93	88	600.000	DPU

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program penataan desa	Persentase sarana dan prasarana desa yang terpenuhi dan baik	55,23	65,23	1.970.000	Dispermasdes
				Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	69,40	70,82	75.000	Dispermasdes
				Program pengembangan perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	2.415.075	Dinas Perkimta
					Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100,00	100,00		Dinas Perkimta
				Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentanse penanganan perumahan tidak layak huni	13,06	17,98	8.520.000	Dinas Perkimta
				Program kawasan permukiman	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan	35,47	45,72	4.600.000	Dinas Perkimta
				Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase ketersediaan psu perumahan	83,31	84,50	14.300.000	Dinas Perkimta

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai peningkatan status mutu air sungai	3,70	7,41	2.220.812	DLH
					Presentase pengendalian lahan terkontaminasi limbah b3	1,08	9,76		DLH
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan			Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan	Program pengelolaan keanekaragama n hayati (kehati)	Persentase peningkatan luas lahan kehati yang terkelola	0	34,72	350.000	DLH
ketahanan bencana, dan perubahan iklim			limbah pencemar lingkungan	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase penanganan limbah b3	60,00	62,50	275.000	DLH
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan akses sanitasi/ limbah domestik	94,37	95,57	2.749.320	DPU

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	47,29	52,08	10.405.000	DLH
					Persentase pengurangan sampah	14,00	17,92		DLH
				Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	78,00	82,00	14.166.000	DPU
		Pemulihan dan transformasi		Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (kg.)	1.964.378	2.003.862	759.538	DKPP
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		sektor pertanian, perdagangan, industri, koperasi dan ukm, pariwisata dan iklim	Penyiapan dan pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan		Nilai produksi perikanan tangkap (rp.)	13.608.184	13.881.708		DKPP
		investasi ramah lingkungan		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase perairan umum daratan (pud) yang bebas dari destructive fishing	11,11	55,56	145.144	DKPP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (kg)	2.730.262	2.764.493	2.193.469	DKPP
					Nilai produksi perikanan budidaya (rp.000)	145.642.227	148.291.680		DKPP
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produksi pengolahan hasil perikanaan	5.478.639	5.492.344	231.953	DKPP
					Nilai produksi pengolahan hasil perikanan (rp.000)	131.189.142	131.517.312		DKPP
			Penyiapan dan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produksi daging (kg)	11.284.734	11.511.557	1.058.596	Dinas Tan KP
			pengembangan sektor pertanian		Produksi telur (kg.)	10.760.493	10.976.779		Dinas Tan KP
			kreatif meliputi tanaman		Produksi susu (kg.)	604.664	616.818		Dinas tankp
			pangan holtikultura, perkebunan dan peternakan ramah		Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (opt)	89,80	89,90	1.002.596	Dinas Tan KP
			lingkungan		Persentase alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi	63,00	65,00		Dinas Tan KP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Luas lahan pertanian organik	2,00	2,00		Dinas Tan KP
					Rasio penggunaan alsintan pra panen	62,72	62,98		Dinas Tan KP
					Rasio penggunaan alsintan pasca panen	15,51	16,98		Dinas Tan KP
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Indeks pertanaman	1,52	1,62	10.058.374	Dinas Tan KP
					Aksebilitas jalan usaha tani (km/ha)	2,60	3,34		Dinas Tan KP
					Luas lahan sawah lestari	100,00	100,00		Dinas Tan KP
				Program pengendalian dan penanggulanga n bencana pertanian	Rasio serangan organisme pengganggu tanaman (opt)	< 2,5	< 2,5	90.000	Dinas Tan KP
					Rasio penggunaan agen pengendali hayati per luas tanam dalam menekan serangan opt padi	0,00	1,5		Dinas Tan KP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase ternak terkendali status kesehatannya	31,37	5,60	288.250	Dinas Tan KP
					Persentase pengawasan peredaran produk hasil ternak yang aman sehat utruh dan halal/asuh	100	100		Dinas Tan KP
				Program penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar dasar penyuluhan	0	27	379.760	Dinas Tan KP
					Penumbuhan peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	0,00	2,51		Dinas Tan KP
			Penguatan dan diversifikasi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase penguatan cadangan pangan	26,50	28,50	222.200	Dinas Tan KP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	48,00	50,00		Dinas Tan KP
				Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	72,00	90,00	37.768	Dinas Tan KP
			Penyehatan dan pengembangan	Program perencanaan dan pembangunan industry	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam rpip	60,00	70,00	800.000	Disperinaker
			industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (iui) kecil dan industri menegah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	17.929	Disperinaker

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (sii nas)	20,00	60,00	34.080	Disperinaker
			Penguatan dan pengembangan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi tujuan wisata produktif (dtw) yang ditetapkan	78,33	85	4.980.000	Dinas Porapar
			destinasi wisata ramah lingkungan		Persentase usaha pariwisata memiliki tanda daftar usaha pariwisata (tdup)	69,00	79,00		Dinas Porapar
			Pengembangan sdm pariwisata kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase sdm pariwisata yang dibina	50	65	900.000	Dinas Porapar
			Penguatan fungsi pasar tradisional era	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar direhabilitasi	50,00	65,38	2.500.000	Dinas Dagkop UKM
			tatanan baru		Persentase pasar e-ritribusi	7,69	46,15		Dinas Dagkop UKM

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase sarana dan prasaran pendistribusian yang terkelola dengan baik	100,00	100,00		Dinas Dagkop UKM
			Pengembangan	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	2	2,00	150.000	Dinas Dagkop UKM
			layanan dan sistem perdagangan digital	Program pengembangan ekspor	Persentase laju nilai ekspor	1	1,00	-	Dinas Dagkop UKM
			G	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi bermitra	1,04	3,64	35.000	Disdagkop umkm
			Pemulihan dan pengembangan	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase peningkatan umkm yang bermitra	2,63	4,21	90.000	Dinas Dagkop UKM
			umkm	Program pengembangan umkm	Persentase peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0,00	1,05	160.000	Dinas Dagkop UKM

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengelolaan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam paud	79,86	79,88	247.572.563	Dinas Dikbud
Meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing	Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sdm menuju sdm berdaya saing	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis tik		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,27		Dinas Dikbud
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan dasar	107,03	100		Dinas Dikbud

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan menengah	105,99	100,00		Dinas Dikbud
					Rata-rata nilai kelulusan sd	77.47	76		Dinas Dikbud
					Rata-rata nilai kelulusan smp	70.86	73.36		Dinas Dikbud
				Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio guru kelas paud	23,00	22,00	33.807.633	Dinas Dikbud
					Rasio guru kelas TK	3,16	4,61		Dinas Dikbud
					Rasio guru kelas SD	19:11	1.40		Dinas Dikbud
					Guru mapel PAI	3.00	2.40		Dinas Dikbud
					Guru mapel PJOK	2.90	2.40		Dinas Dikbud
					Rasio guru mapel SMP	04:38	20:19		Dinas Dikbud
					Rasio guru mapel paket A	06:14	06:14		Dinas Dikbud

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Rasio guru mapel paket B	22:44	22:44		Dinas Dikbud
					Rasio guru mapel paket C	18:14	18:14		Dinas Dikbud
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio daya tampung rs terhadap jumlah penduduk	0,092	0,096	5.764.435	Dinas Kesehatan
					Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,90	100,00		Dinas Kesehatan
			Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis tik		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	98,00		Dinas Kesehatan
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	100,00		Dinas Kesehatan
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan	99,00	100,00		Dinas Kesehatan

pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan seknining kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan seknining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan hesehatan sesuai standar pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan sesehatan kesehatan kesehatan	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 39 tahun mendapatkan sesuai standar Persentase variandar Persentase orang usia 15 39 tahun mendapatkan sesuai standar Persentase variandar Persentase variandar sesuai standar Persentase variandar sesuai standar Persentase variandar variandar sesuai standar Persentase variandar variandar sesuai standar Persentase variandar variandar sesuai standar persentase variandar variand						pelayanan				
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase wargan egara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan						kesehatan bayi				
Persentase Persentase warga negara usia 0 tahun ke atas mendapatkan sesuai standar										
kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita lipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan						Cakupan				
Resentation and sesual standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesual standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skesihatan sesual standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesual standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesual standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesual standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesual standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan keseshatan						pelayanan	73 70	01.00		
Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining ke atas mendapatkan skrining he atas mendapatkan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining he atas mendapatkan skrining he atas mendapatkan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan							73,70	91,00		Kesehatan
usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan										
dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skentan seruai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan seruai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skentan skentan seruai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan seshatan kesehatan										
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia foo tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan										
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan										Dinas
pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase openderita hipertensi yang mendapatkan hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesehatan							38,90	55,00		
sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan										Resenatan
Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan servai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanaan kesehatan Dinas Kesehatan 33,60 56,00 Dinas Kesehatan skrining kesehatan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanaan kesehatan										
orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan kesehatan										
S9 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar										
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan						orang usia 15 -				
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan										Dinas
kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan							15,40	30,00		
sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan										
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan										
warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan 10,10 30,00 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan										
usia 60 tahun ke atas 33,60 56,00 Dinas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan										
ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Resentation in the standar in t										
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Nessehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan										ъ.
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan							33,60	56,00		
kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan							ŕ	,		Kesenatan
sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan										
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan										
penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan										
hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan hipertensi yang mendapatkan 10,10 30,00 Dinas Kesehatan										
mendapatkan 10,10 30,00 Kesehatan kesehatan										
pelayanan kesehatan							10.10	30.00		
kesehatan						nelovonon	10,10	10,10 30,00		Kesehatan
						sesuai standar				

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase penderita dm yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	79,00		Dinas Kesehatan
					Persentase odgj berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	70,00		Dinas Kesehatan
					Persentase orang terduga tbc mendapatkan pelayanan tbc sesuai standar	57,10	70,00		Dinas Kesehatan
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi hiv mendapatkan pelayanan deteksi dini hiv sesuai standar	90,50	95,00		Dinas Kesehatan
					Cakupan balita stunting	12,50	12,30		Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	42,00	63,00		Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah RSUD dr soeselo	100	100	26.975.560	RSUD dr soeselo
					Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD soeselo	78,46 (aa)	82 (aa)	137.990.864	RSUD dr soeselo
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah RSUD suradadi	100	100	5.838.651	RSUD suradadi
					Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD suradadi	74,06 (a)	76,16 (a)	22.075.000	RSUD suradadi
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100,00	100,00	120.000	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	83,00	89,60		Dinas Kesehatan
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	30	36,00	820.971	Dinas Kesehatan
					Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100		Dinas Kesehatan
			Peningkatan upaya promosi dan pembudayaan hidup sehat era tatanan baru	Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs)	95,4	96	267.000	Dinas Kesehatan
		Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Peningkatan pelayanan pengarustamaan gender	Program pengarusutama an gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase arg pada belanja operasi APBD	26,84	28,00	87.400	Dinas P3AP2KB

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,06	-	Dinas P3AP2KB
				Program pemenuhan hak anak (pha)	Persentase pencapaian pemenuhan hak anak	50,00	64,00	1	Dinas P3AP2KB
				Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,135	2.050.000	Dinas Porapar
			Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,071		Dinas Porapar
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan	Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin	Program pemberdayaan sosial	Persentase psks perseorangan keluarga dan kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	32,44	66,25	438.335	Dinas Sosial

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
	p d. so p	Perluasan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan warga miskin	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	29,39	62,62	2.003.750	Dinas Sosial	
			dan rentan miskin	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase ppks, fakir miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	97,99	99,21	957.011	Dinas Sosial
			Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakata n, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100,00	100,00	905.000	Dispermasdes

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	21,58	21,79	975.462	Dinas P3AP2KB
				Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	50.000	Disperinaker
		Peningkatan kompetensi	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37.990,00	40.737,000	732.000	Disperinaker
		angkatan kerja dan akselerasi investasi untuk			Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	5,50		Disperinaker
		perluasan lapangan kerja	Peningkatan akselerasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase lokasi potensial yang memiliki profil investasi	0,00	42,86	170.357	Dinas PMPTSP
			kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja	Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	100,00	20,00	316.250	Dinas PMPTSP
				Program pelayanan	Persentase ketepatan waktu	100	100	536.311	Dinas PMPTSP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				penanaman modal	perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu				
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan perusahaan	61,28	67,28	330.000	Dinas PMPTSP

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2021

4.6. Pelaksanaan Program Unggulan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang diimplementasikan dalam RKPD tahun 2022 yaitu:

Tabel 4.8 Pelaksanaan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2022

No	Program Unggulan	Program/Kegiatan RKPD		
1	Pembangunan Sentra Pelayanan	Pembangunan Mall Pelayanan Publik		
	Publik Prima	Rehabilitasi Gedung Dinas		
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	Penumbuhan Wirausaha Muda,	Penumbuhan Wirausaha Pemuda		
	Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat	Pengembangan Kawasan Guci (Wisata <i>Hidro teraphy</i>)		
3	Penguatan Jaringan Infrastruktur dan	Pemeliharaan Jalan Bebas Lubang		
	Jalan Bebas Lubang	Fasilitasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019 (Jalan Ruas Yomani-Guci, BBI, Pasar Balamoa, SPAM dll)		
		Pembnagunan Jalan Sombaga – Sokatengah		
		Pembangunan Jalan Sigedong- Sawangan		
		Peningkatan Jalan Capar – Jatinegara		
		Penyelesaian Jalingkos		
4	Penangan Dampak Covid-19	Penanganan Kesehatan		
		Penangananan Dampak Ekonomi		
		Penanganan Dampak Sosial		
5	Penataan Kota Slawi	Penataan Kota Slawi (Koridor II) berupa pembangunan jalan, drainase, dan median jalan lengkap dengan sarpras pendukung yang memiliki nilai estetika.		
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Bantuan Keuangan Desa Merdeka Sampah		
		Pengadaan Tanah di TPA Penujah		
		Pengadaan Buldozer untuk TPA		
7	Pembinaan Olahraga, Pemberdayaan	Pengembangan Kawasan Cagar Budaya		
	Pemuda dan Pelestarian Budaya	Semedo dan Pendukungnya		
		Pembangunan Jalan Sigentong - Semedo		

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.7. Pelaksanaan Kolaborasi Wilayah Dalam Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang

Perpres 79 tahun 2019 mempunyai peran strategis sebagai payung regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan regulasi ini diharapkan dapat mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan yang kamudian dapat mengungkit perekonomian lokal, regional, dan nasional sehingga dapat tumbuh hingga 7% pada akhir tahun 2024. Melalui Perpres 79 tahun 2019 tersebut, setidaknya terdapat 15 program/kegiatan strategis yang lokusnya berada di Kabupaten Tegal. Adapun dukungan program pembangunan Kabupaten Tegal terhadap Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Dukungan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang

Perpres Nomor 79 Tahun 2019	Isu Strategis RPJMD 2019-2024	Program Pembangunan Prioritas	Kegiatan Strategis	Perangkat Daerah
Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Jimat dan Sungai Rambut	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Pengembangan Sumber Air Baku SPAM Perkotaan	Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kerjasama dg Perguruan Tinggi untuk Study Potensi Sumber Air Permukaan maupun Air Dalam	DiPerkimta
Pembangunan Bendungan Jatinegara		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sertifikasi Teknis Kelayakan Teknis oleh Komite Bendungan; Apprasal/Penentuan Harga; Pembebasan lahan; Penganggaran; Lelang	DPU
Optimalisasi Waduk Cacaban			PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN: Pekerjaan Normalisasi Bibir Waduk	DPU
			(P = 880.00 m'); Pekerjaan Pembuatan Dermaga dan Lansekap; Pekerjaan Pembuatan Pujasera; Pekerjaan Pembuatan Gardu Pandang; Pekerjaan Pembuatan Toilet dan Mushola; Pekerjaan Pembuatan Playground dan Landskip	DPU

Perpres Nomor 79 Tahun 2019	Isu Strategis RPJMD 2019-2024	Program Pembangunan Prioritas	Kegiatan Strategis	Perangkat Daerah
Pengendalian Banjir Sistem Sungai Cacaban		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DED (2017) oleh Pemda Tegal; Review DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Pembangunan Sarpras Konservasi SDA Sungai Pemali (Tegal dan Brebes)			DED (2016) oleh Pemda Tegal; Review DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Peningkatan Jalan Akses Kaligua - Guci		Program Penyelenggaraan Jalan	Koordinasi lintas sektor	DPU
Peningkatan Jalan Yomani - Guci			DED (2020); Koordinasi Anggaran (2021); Konstruksi (2022)	DPU
Peningkatan Jalan dan Perlengkapan Jalan Ketanggungan - Prupuk			Pelebaran Jalan menjadi 12 meter; Pemasangan Guardriil pada Tepi Saluran Irigasi; Penertiban Bangunan Liar yang berada pada Tanah PSDA	DPU
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		Program Pengembangan Perumahan	Verifikasi, validasi, rekomendasi, pembangunan	DisPerkimta
Jawa Tengah		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Verifikasi, validasi, rekomendasi, pembangunan	DisPerkimta
Fasilitasi Pengembangan Industri Klaster Logam	Isu 3. Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata,	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Revitailisasi Penataan Kawasan; Peremajaan Bangunan; Pengembangan Fasilitas	Disperinaker
Revitalisasi Pasar Adiwerna, Balamoa, Guci, Bumijawa	Industri Kreatif, dan Ketahanan Pengan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembahasan dg Kemendag Bln Februari 2020; Peninjauan Lap oleh Kemendag Bln Februari 2020; Telah mengirimkan Semua Dokumen 2020; Koordinasi dg PPMU Prop Jateng	Disdakop UKM

Perpres Nomor 79 Tahun 2019	Isu Strategis RPJMD 2019-2024	Program Pembangunan Prioritas	Kegiatan Strategis	Perangkat Daerah
Pembangunan Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan (BBI)		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	FS (2021); DED (2021); LARAP (2021); Dok Lingkungan (2022); Pembebasan Lahan (2022); Konstruksi (2023)	DKPP
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Koordinasi lintas sektor	DKPP
Pengembangan Pertanian Bawang Putih		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	FS (2022); DED (2022) Dok Lingkungan (2022); Konstruksi (2023)	Dis Tan dan KP

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.8. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat tujuan dan sasaran Global. Sebagai bentuk komitmen Kabupaten Tegal menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan komitmen internasional dan nasional tersebut, maka bentuk integrasinya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.10 Integrasi Program Pembangunan Daerah untuk Pencapaian TPB/SDG's

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program pemberdayaan sosial	Persentase psks perseorangan keluarga dan kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	32,44	66,25	Dinas Sosial
		Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan ppks lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	29,39	62,62	Dinas Sosial
1	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase ppks, fakir miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	97,99	99,21	Dinas Sosial
1		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100,00	100,00	Dispermasdes
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	21,58	21,79	Dinas P3AP2KB
	Tujuan 2. Menghilangkan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (kg.)	1.964.378	2.003.862	DKPP
2	kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan		Nilai produksi perikanan tangkap (rp.)	13.608.184	13.881.708	DKPP
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (kg)	2.730.262	2.764.493	DKPP
			Nilai produksi perikanan budidaya (rp.000)	145.642.227	148.291.680	DKPP

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produksi pengolahan hasil perikanaan	5.478.639	5.492.344	DKPP
			Nilai produksi pengolahan hasil perikanan (rp.000)	131.189.142	131.517.312	DKPP
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produksi daging (kg)	11.284.734	11.511.557	Dinas Tan KP
		_	Produksi telur (kg.)	10.760.493	10.976.779	Dinas Tan KP
			Produksi susu (kg.)	604.664	616.818	Dinas tankp
			Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (opt)	89,80	89,90	Dinas Tan KP
			Persentase alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi	63,00	65,00	Dinas Tan KP
			Luas lahan pertanian organik	2,00	2,00	Dinas Tan KP
			Rasio penggunaan alsintan pra panen	62,72	62,98	Dinas Tan KP
			Rasio penggunaan alsintan pasca panen	15,51	16,98	Dinas Tan KP
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Indeks pertanaman	1,52	1,62	Dinas Tan KP
			Aksebilitas jalan usaha tani (km/ha)	2,60	3,34	Dinas Tan KP
			Luas lahan sawah lestari	100,00	100,00	Dinas Tan KP
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rasio serangan organisme pengganggu tanaman (opt)	< 2,5	< 2,5	Dinas Tan KP
			Rasio penggunaan agen pengendali hayati per luas tanam dalam menekan serangan opt padi	0,00	1,5	Dinas Tan KP

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase ternak terkendali status kesehatannya	31,37	5,60	Dinas Tan KP
			Persentase pengawasan peredaran produk hasil ternak yang aman sehat utruh dan halal/asuh	100	100	Dinas Tan KP
		Program penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar- dasar penyuluhan	0	27	Dinas Tan KP
			Penumbuhan peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	0,00	2,51	Dinas Tan KP
		Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	72,00	90,00	Dinas Tan KP
		Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90	80	Dinas tankp
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio daya tampung rs terhadap jumlah penduduk	0,092	0,096	Dinas Kesehatan
	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan		Persentase rs rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,90	100,00	Dinas Kesehatan
3	meningkatkan kesejahteraan		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	98,00	Dinas Kesehatan
	seluruh penduduk semua usia		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	100,00	Dinas Kesehatan
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	91,00	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
			Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	55,00	Dinas Kesehatan
			Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	30,00	Dinas Kesehatan
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	56,00	Dinas Kesehatan
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	30,00	Dinas Kesehatan
			Persentase penderita dm yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	79,00	Dinas Kesehatan
			Persentase odgj berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	70,00	Dinas Kesehatan
			Persentase orang terduga tbc mendapatkan pelayanan tbc sesuai standar	57,10	70,00	Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi hiv mendapatkan pelayanan deteksi dini hiv sesuai standar	90,50	95,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan balita stunting	12,50	12,30	Dinas Kesehatan
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah RSUD dr soeselo	100	100	RSUD dr soeselo
			Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD soeselo	78,46 (aa)	82 (aa)	RSUD dr soeselo

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah RSUD suradadi	100	100	RSUD suradadi
			Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD suradadi	74,06 (a)	76,16 (a)	RSUD suradadi
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	83,00	89,60	Dinas Kesehatan
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	30	36,00	Dinas Kesehatan
			Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	Dinas Kesehatan
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs)	95,4	96	Dinas Kesehatan
	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan	Program pengelolaan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam paud	79,86	79,88	Dinas Dikbud
4	merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,27	Dinas Dikbud

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan dasar	107,03	100	Dinas Dikbud
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan menengah	105,99	100,00	Dinas Dikbud
			Rata-rata nilai kelulusan sd	77.47	76	Dinas Dikbud
			Rata-rata nilai kelulusan smp	70.86	73.36	Dinas Dikbud
		Program pengembangan kurikulum	Persentase muatan lokal dalam kbm	5,00	5,00	Dinas Dikbud
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio guru kelas paud	23,00	22,00	Dinas Dikbud
			Rasio guru kelas tk	3,16	4,61	Dinas Dikbud
			Rasio guru kelas sd	19:11	1.40	Dinas Dikbud
			Guru mapel pai	3.00	2.40	Dinas Dikbud
			Guru mapel pjok	2.90	2.40	Dinas Dikbud
			Rasio guru mapel smp	04:38	20:19	Dinas Dikbud
			Rasio guru mapel paket a	06:14	06:14	Dinas Dikbud
			Rasio guru mapel paket b	22:44	22:44	Dinas Dikbud
			Rasio guru mapel paket c	18:14	18:14	Dinas Dikbud
		Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase satuan pendidikan berizin	100	100	Dinas Dikbud
5	Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase arg pada belanja operasi apbd	26,84	28,00	Dinas P3AP2KB
	perempuan	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,06	Dinas P3AP2KB

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase data gender dan anak yang tersedia	20,00	40,00	Dinas P3AP2KB
		Program pemenuhan hak anak (pha)	Persentase pencapaian pemenuhan hak anak	50,00	64,00	Dinas P3AP2KB
		Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate) cpr	67,8	69,14	Dinas P3AP2KB
			Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmeet need)	15,27	14,87	Dinas P3AP2KB
		Program pengendalian penduduk	Tfr (angka kelahiran total)	2,28	2,24	Dinas P3AP2KB
	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik pada daerah irigasi (di) kewenangan kabupaten	58,86	61,33	DPU
6		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan akses layanan air minum	61,09	63,32	DPU
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan kabupaten	58,42	61,79	DPU
7	Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua					
	Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh,	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi tujuan wisata produktif (dtw) yang ditetapkan	78,33	85	Dinas Porapar
8.			Persentase usaha pariwisata memiliki tanda daftar usaha pariwisata (tdup)	69,00	79,00	Dinas Porapar
	<u> </u>					Porapar

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
	serta pekerjaan yang layak untuk semua	Program pemasaran pariwisata	Persentase DTW yang dipromosikan	78,33	85,00	Dinas Porapar
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang dibina	50	65	Dinas Porapar
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar direhabilitasi	50,00	65,38	Dinas Dagkop UKM
			Persentase pasar e-ritribusi	7,69	46,15	Dinas Dagkop UKM
			Persentase sarana dan prasaran pendistribusian yang terkelola dengan baik	100,00	100,00	Dinas Dagkop UKM
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	2	2,00	Dinas Dagkop UKM
		Program pengembangan ekspor	Persentase laju nilai ekspor	1	1,00	Dinas Dagkop UKM
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi bermitra	1,04	3,64	Disdagkop umkm
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase peningkatan umkm yang bermitra	2,63	4,21	Dinas Dagkop UKM
		Program pengembangan umkm	Persentase peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen; kumulatif; iku opd	240133,00	631600

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,135	Dinas Porapar
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,071	Dinas Porapar
		Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	Disperinaker
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37.990,000	40.737,000	Disperinaker
			Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	5,50	Disperinaker
		Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	17,82	30,00	Disperinaker
		Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase lokasi potensial yang memiliki profil investasi	0,00	42,86	Dinas PMPTSP
		Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	100,00	20,00	Dinas PMPTSP
		Program pelayanan penanaman modal	Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	100	100,00	Dinas PMPTSP
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan perusahaan	61,28	67,28	Dinas PMPTSP
9	Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh,	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	65,00	72,50	Bappeda dan litbang

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
	meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	0,3	60	DPU
	oorta moratorong movator	Program penataan bangunan gedung	Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	76,88	79,12	DPU
			Rasio bangunan yang memiliki imb	6,50	8,01	DPU
		Program penyelenggaraan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	81,11	84,00	DPU
			Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	88,05	91,00	DPU
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Rasio kepatuhan terhadap itr yang diajukan	79,93	88	DPU
		Program penataan desa	Persentase sarana dan prasarana desa yang terpenuhi dan baik	55,23	65,23	Dispermasdes
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam rpip	60,00	70,00	Disperinaker
		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (iui) kecil dan industri menegah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	Disperinaker
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (sii nas)	20,00	60,00	Disperinaker
10.	Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan adiwerna	0,00	0,00	Kecamatan adiwerna
	antarnegara		Persentase desa maju kecamatan adiwerna	9,52	9,52	Kecamatan adiwerna

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan balapulang	0,00	5,00	Kecamatan balapulang
			Persentase desa maju kecamatan balapulang	5,00	9,52	Kecamatan balapulang
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan bojong	12,00	0,12	Kecamatan bojong
			Persentase desa maju kecamatan bojong	0,29	0,29	Kecamatan bojong
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan bumijawa	0,00	0,00	Kecamatan bumijawa
			Persentase desa maju kecamatan bumijawa	11,11	16,67	Kecamatan bumijawa
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan dukuhwaru	0,00	0,00	Kecamatan dukuhturi
			Persentase desa maju kecamatan dukuhwaru	10,00	10,00	Kecamatan dukuhturi
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan dukuhturi	0,00	0,00	Kecamatan dukuhwaru
			Persentase desa maju kecamatan dukuhturi	5,56	5,56	Kecamatan dukuhwaru
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan jatinegara	0,00	6,00	Kecamatan jatinegara

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
			Persentase desa maju kecamatan jatinegara	6,00	12,00	Kecamatan jatinegara
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan kedungbanteng	0,00	0,10	Kecamatan kedungabnteng
			Persentase desa maju kecamatan kedungbanteng	0,00	0,00	Kecamatan kedungabnteng
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan mandiri kecamatan kramat	0,00	5,26	Kecamatan kramat
			Persentase desa/kelurahan maju kecamatan kramat	16,00	16,00	Kecamatan kramat
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan lebaksiu	7,69	7,69	Kecamatan lebaksiu
			Persentase desa maju kecamatan lebaksiu	15,00	15,00	Kecamatan lebaksiu
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan margasari	8,00	8,00	Kecamatan margasari
			Persentase desa maju kecamatan margasari	46,00	46,00	Kecamatan margasari
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan pagerbarang	0,00	0,00	Kecamatan pagerbarang
			Persentase desa maju kecamatan pagerbarang	8,00	16,00	Kecamatan pagerbarang
		Program pemberdayaan	Persentase desa mandiri kecamatan pangkah	0,00	0,00	Kecamatan pangkah

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		masyarakat desa dan kelurahan				
			Persentase desa maju kecamatan pangkah	4,00	4,00	Kecamatan pangkah
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan slawi	0,00	20,00	Kecamatan slawi
			Persentase desa maju kecamatan slawi	60,00	60,00	Kecamatan slawi
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan suradadi	0,00	0,00	Kecamatan suradadi
			Persentase desa maju kecamatan suradadi	9,00	18,00	Kecamatan suradadi
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan talang	0,00	0,00	Kecamatan talang
			Persentase desa maju kecamatan talang	0,00	5,26	Kecamatan talang
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan tarub	0,00	0,00	Kecamatan tarub
			Persentase desa maju kecamatan tarub	20,00	20,00	Kecamatan tarub
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan mandiri kecamatan warureja	0,00	8,00	Kecamatan warureja
			Persentase desa/kelurahan maju kecamatan warureja	17,00	17,00	Kecamatan warureja

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program pengembangan perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	Dinas Perkimta
	Tujuan 11. Menjadikan kota		Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100,00	100,00	Dinas Perkimta
11	dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentanse penanganan perumahan tidak layak huni	13,06	17,98	Dinas Perkimta
	berkelanjutan	Program kawasan permukiman	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan	35,47	45,72	Dinas Perkimta
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase ketersediaan psu perumahan	83,31	84,50	Dinas Perkimta
12	Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase penguatan cadangan pangan	26,50	28,50	Dinas Tan KP
	berkelanjutan		Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	48,00	50,00	Dinas Tan KP
	Tujuan 13. Mengambil	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai peningkatan status mutu air sungai	3,70	7,41	DLH
13.	tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim		Presentase pengendalian lahan terkontaminasi limbah b3	1,08	9,76	DLH
	dan dampaknya	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan	Persentase penanganan limbah b3	60,00	62,50	DLH

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		berbahaya dan beracun (limbah b3)				
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan akses sanitasi/ limbah domestik	94,37	95,57	DPU
		Program pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	47,29	52,08	DLH
			Persentase pengurangan sampah	14,00	17,92	DLH
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	78,00	82,00	DPU
14	Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase perairan umum daratan (pud) yang bebas dari destructive fishing	11,11	55,56	DKPP
	Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfataan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase peningkatan luas lahan kehati yang terkelola	0	34,72	DLH
15		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	30,00	45,00	DLH
	Tujuan 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan	Program aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan tik dalam digitalisasi pemerintahan	25,00	50,00	Dinas Kominfo
16	berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun		Persentase opd yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	16,67	70,83	Dinas Kominfo

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
	kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00	65,00	Dinas Kominfo
		Program informasi dan komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	20,00	30,00	Dinas Kominfo
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan adiwerna	76,37	78,87	Kecamatan Adiwerna
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan balapulang	79,29	81,79	Kecamatan Balapulang
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan bojong	79,62	82,12	Kecamatan Bojong
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan bumijawa	87,53	90,03	Kecamatan Bumijawa
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan dukuhwaru	79,37	81,87	Kecamatan Dukuhturi
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan dukuhturi	77,44	79,94	Kecamatan Dukuhwaru

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan jatinegara	79,70	82,20	Kecamatan Jatinegara
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan kedungbanteng	82,00	84,00	Kecamatan Kedungabnteng
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan kramat	78,98	81,48	Kecamatan Kramat
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan lebaksiu	77,25	81,25	Kecamatan Lebaksiu
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan margasari	77,40	79,90	Kecamatan Margasari
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan pagerbarang	77,63	80,13	Kecamatan Pagerbarang
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan pangkah	78,74	81,24	Kecamatan Pangkah
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan slawi	79,67	82,17	Kecamatan Slawi
		Program penyelenggaraan	IKM kecamatan suradadi	79,76	82,26	Kecamatan Suradadi

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		pemerintahan dan pelayanan publik				
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan talang	73,20	75,70	Kecamatan Talang
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan tarub	80,55	83,05	Kecamatan Tarub
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan warureja	77,40	79,90	Kecamatan Warureja
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase opd yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	15,00	30,00	Disdukcapil
		Program pendaftaran penduduk	Persentase penduduk ber kartu keluarga	91,67	94,00	Disdukcapil
			Perekaman ktp elektronik	99,68	99,74	Disdukcapil
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki kia	21,80	60,00	Disdukcapil
		Program pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran	93,10	95,50	Disdukcapil
			Persentase penduduk ber akta kematian	68,54	70,04	Disdukcapil
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan	100,00	100,00	Bappeda dan Litbang
			Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	75,00	75,00	Bappeda dan Litbang

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan adiwerna	50,00	68,00	Kecamatan Adiwerna
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan balapulang	35,00	70,00	Kecamatan Balapulang
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan bojong	35,00	68,00	Kecamatan Bojong
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan bumijawa	35,00	68,00	Kecamatan Bumijawa
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan dukuhwaru	35,00	50,00	Kecamatan Dukuhturi
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan dukuhturi	50,00	68,00	Kecamatan Dukuhwaru
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan jatinegara	35,00	68,00	Kecamatan Jatinegara
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan kedungbanteng	35,00	68,00	Kecamatan Kedungabnteng
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan kramat	30,00	68,00	Kecamatan Kramat
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan lebaksiu	35,00	68,00	Kecamatan Lebaksiu
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan margasari	50,00	89,00	Kecamatan Margasari

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan pagerbarang	35,00	68,00	Kecamatan Pagerbarang
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan pangkah	35,00	68,00	Kecamatan Pangkah
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan slawi	35,00	68,00	Kecamatan Slawi
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan suradadi	35,00	68,00	Kecamatan Suradadi
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan talang	35,00	68,00	Kecamatan Talang
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan tarub	35,00	68,00	Kecamatan Tarub
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan warureja	35,00	68,00	Kecamatan Warureja
		Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan apbd	100,00	100,00	BPKAD
			Persentase ketepatan waktu penerbitan sp2d	100,00	100,00	BPKAD
			Persentase ketepatan waktu penyusunan peraturan daerah & peraturan bupati pertanggungjawaban APBD	100,00	100,00	BPKAD
		Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio pad	14,09	15,06	BAPPENDA
			Rasio piutang pajak daerah	66,26	95,00	BAPPENDA
		Program pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan laporan bmd yang baik dan tepat waktu	62,50	70,00	BPKAD

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan bpk ri	91,70	92,00	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi	100,00	100,00	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat kabupaten	39,02	60,00	Inspektorat
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase predikat wbk/wbbm berdasarkan penilaian internal	16,67	16,67	Inspektorat
			Persentase pemenuhan iku perangkat daerah	60,41	66,66	Inspektorat
			Persentase pd menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	81,25	85,41	Inspektorat
		Program kepegawaian daerah	Persentase asn yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,12	0,12	BKD
			Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	87,97	94,77	BKD
			Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	35,76	41,82	BKD
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%)	110,04	259,85	BKD
			Rasio pegawai fungsional (%)	9,87	15,28	BKD
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93,50	93,26	BKD
		Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase pns yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	47,49	70,00	BKD

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
			Persentase pns mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	33,40103814	40	BKD
		Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tppo (per 100.000 penduduk perempuan)	6,79	8,3	Dinas P3AP2KB
		Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,01	0.0120	Dinas P3AP2KB
		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80,42	86,66	Badan Kesbangpol
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase gangguan kantibmas yang tertangani	85	100	Badan Kesbangpol
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase konflik yang tertangani	97	100	Badan Kesbangpol
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan adiwerna	100	100	Kecamatan Adiwerna
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan balapulang	100	100	Kecamatan Balapulang
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan bojong	100	100	Kecamatan Bojong

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan bumijawa	100	100	Kecamatan Bumijawa
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan dukuhwaru	75	80	Kecamatan Dukuhturi
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan dukuhuturi	100	100	Kecamatan Dukuhwaru
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan jatinegara	100	100	Kecamatan Jatinegara
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan kedungbanteng	81	82	Kecamatan Kedungabnteng
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan kramat	100	100	Kecamatan Kramat
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan lebaksiu	70	75	Kecamatan Lebaksiu
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan margasari	100	100	Kecamatan Margasari
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan pagerbarang	100	100	Kecamatan Pagerbarang
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan pangkah	100	100	Kecamatan Pangkah
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan slawi	100	100	Kecamatan Slawi

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan suradadi	100	100	Kecamatan Suradadi
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan talang	100	100	Kecamatan Talang
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan tarub	100,00	100,00	Kecamatan Tarub
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan warureja	82,00	83,00	Kecamatan Warureja
		Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase gangguan trantibun yang tertangani	82,00	86,00	Satpol PP
			Presentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan	83	87	Satpol PP
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79	88	Satpol pp
		Program penanggulangan bencana	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	71,66	BPBD
			Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	1,38	1,52	BPBD

NO	TUJUAN TPB/SDGS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA 2020	Target Tahun 2022	PD
			Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	24,54	BPBD
		Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100,00	100,00	Dinas Sosial
17	Tujuan 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan					

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.9. Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Isu-isu pembangunan yang berorientasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah diintervensi melalui prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah. Berikut disajikan dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui program pembangunan prioritas daerah dan prioritas program daerah sebagaimana table berikut:

Tabel 4.11 Keterkaitan antara Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Program Pembangunan Prioritas Daerah

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program Pembangunan Prioritas	Indikator Outcome	Kondisi Awal 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasai dalam PAUD	79,86	79,88	Disdikbud
1	Bidang Urusan Pendidikan	Jumlah warga Negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar jenjang SD/MI	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan dasar	107,03	100	Disdikbud	
		Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs		Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan menengah	105,99	100,00	Disdikbud

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program Pembangunan Prioritas	Indikator Outcome	Kondisi Awal 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,25	97,27	Disdikbud
		Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	98,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	D.,,	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	100,00	Dinas Kesehatan
2	Bidang Urusan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan bayi Pemenuhan Upaya Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00	Dinas Kesehatan	
	1	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	91,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	55,00	Dinas Kesehatan

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program Pembangunan Prioritas	Indikator Outcome	Kondisi Awal 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	30,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	78,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	30,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	79,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	70,00	Dinas Kesehatan

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program Pembangunan Prioritas	Indikator Outcome	Kondisi Awal 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,10	70,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,50	95,00	Dinas Kesehatan
3	Bidang Urusan Pekerjaan	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	65,55	Perkimta
3	Umum	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	95,57	Perkimta
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	Perkimta

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program Pembangunan Prioritas	Indikator Outcome	Kondisi Awal 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena rekolasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
		Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan	70,00	67,00	Satpol PP
5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	71,66	BPBD
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan		Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan pencegahan dan	1,38	1,52	BPBD

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program Pembangunan Prioritas	Indikator Outcome	Kondisi Awal 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
		terhadap bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana		kesiap siagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase jumlah warga negara yg memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	24,54	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	66	82,00	Satpol PP
6	Bidang Urusan Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar "gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	25,16	47,01	Dinsos

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program Pembangunan Prioritas	Indikator Outcome	Kondisi Awal 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
		Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti					
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	97,91	99,21	Dinsos

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.10. Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Kebijakan Spasial

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 memperhitungkan kebijakan pembangunan berbasis spasial. Berikut disajikan gambaran desain pelaksanaan kebijakan pembangunan spasial untuk sektor Pengembangan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah serta sektor Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

a) Pembangunan Kawasan Perdesaan

Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu dilakukan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Desa-desa yang berbatasan ini dapat terdiri atas desa dalam kecamatan yang berbeda.

Kajian eksploratif memunculkan delineasi pengelompokan desa dengan tema tertentu sesuai dengan kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Jumlah desa dalam suatu tema Kawasan Perdesaan disusun dengan mempertimbangkan dampak positif yang signifikan dalam mendukung pemajuan desa dan kabupaten.

Pendekatan (ancangan) pemajuan desa melalui pengelompokan desa secara tematik ini tidak dilakukan hanya untuk suatu kelompok desa tertentu, melainkan digunakan untuk membangun seluruh desa, tidak ada satu desapun yang terlepas dari pengelompokan secara tematik tersebut.

Dalam memajukan desa dengan pendekatan kawasan ini, keterkaitan antara pengembangan kelompok desa dan kelurahan merupakan pertimbangan penting, sesuai dengan amanat undang-undang Penataan Ruang. Dengan demikian sejumlah 281 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Tegal merupakan suatu kesatuan yang maju secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengelompokan desa dalam Kawasan Perdesaan dilakukan dalam kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Artinya, tema dikemas dalam bentuk yang cukup unik dan tajam agar memiliki daya ungkit yang tinggi.

Kawasan I, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Suradadi, Kramat dan Warureja, diberi tema yang mengangkat keserasian hamparan kebun melati dan industri di sepanjang pesisir utara kabupaten Tegal. Dengan profil seperti itu kawasan perdesaan ini diberi nama "Industri di Lautan Melati".

Kawasan II, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Talang, Pangkah, Adiwerna, Dukuhturi dan Tarub, mengangkat tema keserasian antara kegiatan persawahan padi dengan sentra industri kecil di sekitarnya yang berpotensi mengeluarkan limbah. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama "Langkah Adituri" yang diambil dari singkatan kata Talang, Pangkah, Adiwerna, Tarub dan Dukuhturi.

Kawasan III, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng dan Pangkah, merupakan perpaduan antara infrastruktur pertanian berupa waduk dengan segenap sistem pemasokan air, digabung dengan pelestarian warisan bumi yang berpotensi sebagai eduwisata. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama "Warisan Bumi Lestari".

Kawasan IV, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Lebaksiu, Dukuhwaru, Slawi dan Pangkah, memiliki keunikan tersendiri. Di kawasan ini terdapat pusat pemerintahan kabupaten Tegal. Taman Teknologi Pertanian juga berlokasi di kawasan ini. Dengan demikian kawasan ini merupakan pendorong inovasi kawasan perdesaan. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama "Handayani Inovasi".

Kawasan V, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Margasari, Balapulang dan Pagerbarang, merupakan sentra budidaya yang cukup lengkap meliputi tanaman pangan, peternakan termasuk sentra penanaman pohon sebagai bahan baku bangunan. Industri sandang juga mulai dimulai di sini, sehingga tema kawasan perdesaannya adalah perpaduan antara kegiatan-kegiatan tadi. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama "Sapa Papa", yang merupakan singkatan dari kata Sandang, Pangan, Papan dan Pakan.

Kawasan VI, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Bumijawa dan Bojong, memiliki ciri pertanian yang khusus. Budidaya tanaman obat berpusat di sini, bahkan dilengkapi dengan klinik jamu. Selain budidaya tanaman berkhasiat obat, di kawasan ini juga terdapat potensi pemanfaatan air untuk kegiatan terapi. Dengan ciri-ciri tersebut, ditambah dengan lingkungan alam yang menarik, kawasan ini bertemakan kesehatan alami dan pariwisata. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama "Sehat Alami".

Untuk membuat gerakan pembangunan Kawasan Perdesaan ini menjadi efisien, masing-masing Kawasan Perdesaan Tematik kemudian dibagi menjadi beberapa sub-kawasan untuk kepentingan kemudahan pengelolaan.

Karena sebagian besar wilayah wilayah kabupaten Tegal merupakan kawasan perdesaan, ditambah dengan pusat pemerintahan kabupaten berada di kawasan perdesaan, maka Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dijadikan "cross cutting issues" yang sangat strategis.

Karena kawasan perdesaan mencakup seluruh desa di kabupaten Tegal, programprogram penting pembangunan kabupaten Tegal perlu digerakkan melalui Kawasan Perdesaan Tematik.

Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Tematik, program penting pembangunan kabupaten dijadikan program generik, sehingga seluruh kawasan perdesaan wajib melaksanakannya, sedangkan program yang sesuai dengan tema kawasan perdesaan dilaksanakan sebagai program spesifik.

Program penting yang dapat dilaksanakan sebagai program generik adalah sebagai berikut:

Sistem pengelolaan sampah, Kegiatan ramah lingkungan, Penumbuhan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), Peningkatan akses telekomunikasi, Jalan lingkar kawasan, Transportasi lingkar kawasan, termasuk penataan transportasi tertentu, Ruang publik terbuka, Pusat belajar masyarakat, termasuk balai pertemuan warga, fasilitas kesehatan masyarakat, Pengukuran daya dukung lingkungan, Peningkatan skor SDG, termasuk penanganan stunting, dan Pelaksanaan Permendes tentang prioritas pembangunan desa.

Program spesifik Kawasan Perdesaan Tematik disusun sesuai dengan tema kawasan dan disepakati oleh desa-desa anggota kawasan.

Pembangunan kawasan perkotaan yang juga merupakan program pembangunan kabupaten diserasikan dengan pembangunan tata ruang dan pendukung pembangunan secara komplementer.

Kelurahan
Dampyak
Kudaile
Pakembaran
Procot
Slawi Wetan
Kagok

KP Langkah Adituri
KP Warisan Bumi Lestari
KP Handayani Inovasi
KP SaPa PaPa
KP Sehat Alami

Gambar 4.1 Delineasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tegal

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tahun 2021

b) Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah

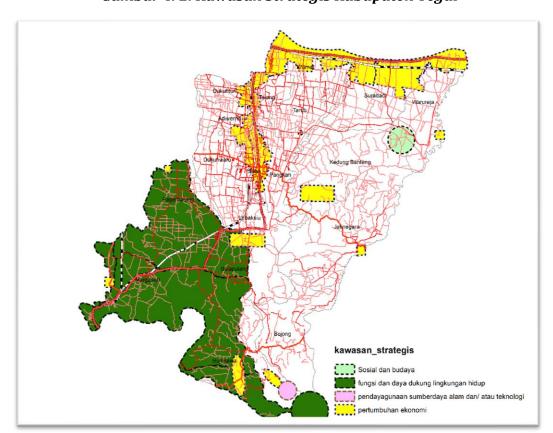
Pendekatan spasial dalam pengembangan infrastruktur dan pembangunan wilayah ini dimaksudkan untuk menciptkan koneksivitas atau keterhubungan antar wilayah di Kabupaten Tegal sehingga diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menyatukan suatu wilayah Ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak akan lagi tercipta karena pembangunan tidak berfokus di wilayah tertentu dan tanpa diskriminasi pada daerah yang dianggap terbelakang. Dalam pendekatan ini yang menjadi dasar adalah beberapa kawasan strategis yang ada. Kawasan strategis di Kabupaten Tegal adalah: Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Untuk KSP terdiri dari:

- a. Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebes, Kota, Tegal, Slawi, dan Pemalang) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Panas Bumi Guci dan Baturaden dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi;
- c. Daerah Aliran Sungai kritis lintas Kabupaten/ Kota terletak di DAS Pemali dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- d. Kawasan Gunung Slamet dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sedangkan untuk KSK di Kabupaten Tegal terdiri terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial dan budaya, dimana:

- 1. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna meliputi: Kecamatan Slawi; dan Kecamatan Adiwerna.
 - b. kawasan Industri Pantura dan Margasari meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja; Kecamatan Margasari
 - c. Kawasan Agropolitan meliputi: Kecamatan Bojong; dan Kecamatan Bumijawa;
 - d. Kawasan Minapolitan terdiri atas: Perikanan tangkap Waduk Cacaban dan Perikanan budidaya di Kecamatan Lebaksiu dan Balapulang
 - e. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Brebes terletak di Kecamatan Pagerbarang dan Margasari;
 - f. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Pemalang terletak di Kecamatan Warureja dan Jatinegara; dan
 - g. Wilayah perbatasan dengan Kota Tegal terletak di Kecamatan Kramat, Kecamatan Talang dan Kecamatan Dukuhturi.
 - h. Kawasan Perdagangan dan Jasa Mejasem Raya di Kecamatan Kramat;
 - i. Kawasan Perdagangan dan Jasa Balamoa di Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Tarub.
- 2. KSK dari sudut kepentingan Sosial dan budaya berupa: kawasan Semedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Kawasan Pesarean Kecamatan Adiwerna

Sebaran Kawasan strategi di Kabupaten Tegal tersebar sebagaimana peta di bawah ini.



Gambar 4. 2. Kawasan Strategis Kabupaten Tegal

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, selesai mendasari permasalahan dan isu strategis serta pencapaian target, juga dilakukan pendekatan spasial dalam penentuan lokasi program/kegiatan ssehingga diaharapkan pencapaian target dapat terlaksana secara cepat. Pendekatan spasial rencana program/kegiatan khususnya untuk pengembangan infrastruk dan wilayah di Kabupaten Tegal Tahun 2021 tertuang dalam table di bawah ini

Tabel 4.21.
Pendekatan Spasial Rencana Program/Kegiatan Tahun 2022 di Sektor
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Uraian/Program/ Kegiatan	Lokus	Keterkaitan dengan Kawasan Strategis
Program Jalan dan Progr	am Jembatan	
1. Peningkatan Jalan dan Jembatan	Ruas Babakan – Jatibogor – Kertasari – Kesemen - Warureja	 Konektifitas Pusat Pertumbuhan EKonomi Kemantran – Jatibogor – Kertsari – Warureja Kawasan Perbatasan Warureja dan Kab Pemalang
	Ruas Babadan – Kedungjati – Bader – Balamoa	 Konektifitas Pusat pertumbuhan Warureja – Kedungjati – Balamoa KSK Semedo Kawasan Perbatasan Warureja dan Kab Pemalang
	Ruas Banjaran – Balamoa	Konektiftas Pertumbuhan Banjaran – Balamoa
	Ruas Sawangan – Sigedong	 Pembukaan Isolasi/Jalur Evakuasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Meletus KSP Gunung Slamet
	Ruas Jalan Kedungjati - Kendayakakan	KSK Perbatasan Kab Tegal Pemalang (Kecamatan Warureja)
	Banjaranyar – Batuagung – Cenggini – Pagerkasih - Jejeg	Konektifitas Pusat Pertumbuhan Banjar anyar dan Jejeg
2. Peningkatan Kapasitas (Pelebaran Jalan dan Jembaan)	Ruas Yomani – Kalibakung _ Bojong – Tuwel - Guci	 Konektifitas Yomani – Kalibakung _ Bojong – Tuwel - Guci KSK Objek WIsata Guci

Uraian/Program/ Kegiatan	Lokus	Keterkaitan dengan Kawasan Strategis
	Ruas Larangan – Kemantran – Balamoa	 Konektifitas Pusat pertumbuhan Larangan – Kemantran – Balamoa – Pangkah - Bogares
3. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas/bagian ruas jalan yang kondisinya Rusak Ringan dan Sedang di sekuruh wilayah kabupaten Tegal		Untuk Porsi Diprioritaskan pada Jalan- jalan strategis yang menghubungkan antar Kawasan Strategis terutuma pusat – pusat pertumbuhan baru
Program Tata Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1. Penataan Kota Slawi	 Penataan RTH Median Jalan Gadjahmada Revitalisasi Saluran Drainase Revitalisasi Trotoar Beutifikasi Spot – Spot 	Kawasan Pusat Perkotaan Slawi

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2021.

4.11. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif. Pembangunan yang inovatif diinisiasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Berikut disajikan tabel inovasi kebijakan pembangunan yang telah diinsiasi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Tabel 4.12 Inovasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal

No	Prioritas Daerah / Inovasi Pembangunan	Gambaran Umum Inovasi	
A	Prioritas: Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK		
1.	Klinik/POJOK Perencana	Klinik/Pojok Perencana bertujuan untuk melayani siapapun baik masyarakat umum maupun ASN yang akan sharing, berbincang, berdiskusi, konsultasi, belajar terkait perencanaan pembangunan daerah sesuai tema yang diusulkan. Siapapun dapat membuat ajuan waktu pertemuan di kantor Bappeda dan Litbang secara online yang kemudian secara berjenjang akan muncul disposisi dan jadwal pertemuan. Pengusul cukup masuk di Website Bappeda dan Litbang, kemudian mengisi format yang telah disediakan kemudian menunggu penjadwalan saja. Diskusi Pojok Perencana tidak hanya satu arah dalam artian kita sama-sama belajar untuk mingkatkan efektifitas pembangunan di Kabupaten Tegal.	
2	Perda Perencanaan	Perda No 4. Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah mengatur antara lain:	

No	Prioritas Daerah / Inovasi Pembangunan	Gambaran Umum Inovasi
		a) alokasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai besaran realsiasi PAD. Dengan alokasi yang terukur, setiap anggota DPRD mengetahui pagu yang dapat dialokasikannya terhadap percepatan pembangunan yang dijaring melalui usulan hasil reses;
		b) Konsistensi antara RKPD, KUA/PPAS dan RAPBD. Tidak dimungkinkan terdapat usulan program dan kegiatan baru dalam RAPBD maupun KUA/PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD.
3	Lahir Olih Akta Kelahiran (LOAK)	Program yang menjamin setiap bayi yang lahir di fasilitas kesehatan langsung mendapat NIK, terdaftar dalam KK dan memperoleh Akta Kelahiran.
4	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Mengintegrasikan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan IMB dan pembayaran PBB. Di setiap kecamatan dibangun Rumah PATEN, ruangan yang representatif dan mandiri.
5	Musrenbang Award	Musrenbang Award diberikan kepada OPD yang melaksanakan Forum OPD dan Kecamatan yang menyelenggarakan Musrenbangcam dengan baik, meliputi dinamika forum, kualitas usulan masyarakat yang didanai PIK, inovasi pelaksanaan Musrenbang hingga keterwakilan perempuan dalam forum
6	Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)	PIK dialokasikan untuk wilayah kecamatan, senilai antara Rp. 2-3 miliar per kecamatan. Alokasi tersebut merupakan perencanaan bergaransi, artinya pagu diberikan kepada wilayah dan masyarakat sendiri yang menentukan peruntukannya melalui Musrenbangcam sesuai kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, Musrenbangcam pasti/menjamin realisasi usulan masyarakat melalui Musrenbangcam.
7	Peraturan Bupati tentang Pengembangan Inovasi	Pemeritnah Kabupaten Tegal berupaya menstimulasi seluruh orgnanisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus berinovasi terhadap segala bentuk peningkatan layanannya. Melalui inovasi yang muncul dari OPD juga diharapkan dapat merangasang masyarakat untuk melakukan inovasi-inovasi diberbagai bidang. Untuk itu dibentuk Peraturan Bupati yang mewajibkan seluruh Eselon II dan Eselon III untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya minimal 1 inovasi tiap tahunnya.
8	Pengarusutamaan dalam Pembangunan	Pembangunan di Kabupaten Tegal didesain melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan (mainstreaming) merupakan upaya untuk menjadikan isuisu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak daam melaksanakan pembangunan. Program dan kegiatan dalam pengarusutamaan (mainstreaming) tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming) namun dapat secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming). Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal yaitu: Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarustamaan penanggulangan masalah gizi (stunting), Pengarusutamaan inovasi, Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi, Pengarusutamaan Standar Pelayanan Mininal (SPM), Pengarusutamaan Mitigasi Risiko.
В	Prioritas: Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	
9	Data kelompok sasaran program secara tunggal	Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menggunakan data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 sebagai basis data kelompok penerima sasaran setiap program pembangunan. Sampai saat ini PBDT 2015 telah menjadi acuan kelompok sasaran penerima manfaat program PDPM, penanggulangan kemiskinan, hingga kepesertaan JKN PBI.

No	Prioritas Daerah / Inovasi Pembangunan	Gambaran Umum Inovasi
10	Penyediaan jaminan hidup miskin absolut/Three J	Masih terdapat warga miskin absolut, yaitu tidak punya tempat tinggal milik sendiri, hidup di bantaran sungai, tidak ada yang memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga, serta sakit berat dan tidak mampu berobat. Pemerintah akan memfasilitasi jaminan rumah (jarum) bagi warga yang belum memiliki rumah, jaminan hidup (jadup) berupa uang saku setiap bulan bagi warga yang tidak produktif, serta jaminan kesehatan (jakes) bagi warga miskin yang sakit berat dan tidak termasuk sakit yang dibiayai JKN
11	Rencana Aksi Bersama (RAB) Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD)	RAB PKD merupakan komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa untuk mengintervensi penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni, anak putus sekolah dan pemberdayaan difabel. Pemkab mengintervensi melalui APBD, Pemdes mengintervensi melalui APBDesa, terutama melalui Dana Desa.
c	Prioritas: Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	
12	Jalan Bebas Lubang	Kebijakan Jalan Bebas Lubang diintervensi melalui strategi manajemen pemeliharaan jalan (pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala) serta peningkatan jalan (perbaikan struktur dan pelebaran jalan). Dalam rangka aksi cepat tanggap pemeliharaan jalan rutin didesain regu-regu reaksi cepat yang rutin melakukan pendataan, dilengkapi sarana dan prasarana serta material pemeliharaan jalan yang cukup.
13	Kampung Ora Kumuh	Merupakan bantuan keuangan kepada desa untuk penuntasan kawasan kumuh 0 Ha di Kabupaten Tegal. Upaya yang dilakukan melalui penadataan dan penetapan kawasan intervensi, pembentukan dan penguatan lembaga pelaksana (Badan Keswadayaan Masyarakat), penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah, penyelenggaraan kegiatan pengelolaan air bersih, dan penataan kawasan lingkungan kumuh.
14	Program Merdeka Sampah	Merupakan skema bantuan keuangan kepada desa senilai Rp. 100 juta/desa untuk pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengurangan, pengangkutan dan pemrosesan sampah secara holistik, terpadu, swakarsa, dan pemberdayaan. Desa lokasi program menyediakan lahan TPS 3R, pembentukan lembaga pengelola, hingga menyiapkan regulasi peraturan desa tentang pengelolaan sampah di desa.
15	Penataan Kawasan Perdesaan	Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu dilakukan pembangunan antardesa dalam satu kabupaten melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Desadesa yang berbatasan ini dapat terdiri atas desa dalam kecamatan yang berbeda. Kawasan I, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Suradadi, Kramat dan Warureja, diberi nama "Industri di Lautan Melati". Kawasan II, "Langkah Adituri" yang diambil dari singkatan kata Talang, Pangkah, Adiwerna, Tarub dan Dukuhturi. Kawasan III, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng dan Pangkah, diberi nama "Warisan Bumi Lestari". Kawasan IV, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Lebaksiu, Dukuhwaru, Slawi dan Pangkah, diberi nama "Handayani Inovasi". Kawasan V, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Margasari, Balapulang dan Pagerbarang, diberi nama "Sapa Papa", yang merupakan singkatan dari kata Sandang, Pangan, Papan dan Pakan. Kawasan VI, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Bumijawa dan Bojong, diberi nama "Sehat Alami".

No	Prioritas Daerah / Inovasi Pembangunan	Gambaran Umum Inovasi	
D	Prioritas: Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru		
16	Yuh Sekolah Maning	Mengembalikan anak usia sekolah yang tidak sekolah ke jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal. Setiap anak usia sekolah yang tidak sekolah akan didampingi Pendamping yang melakukan verifikasi, validasi, motivasi, serta pemantauan. Fasilitasi diberikan bantuan biaya operasional sekolah (non formal) dan bantuan biaya personal siswa.	
17	Menurunkan kematian ibu dan kematian bayi	Upaya yang dilakukan antara lain menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran, mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal, puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu, kerja sama lintas sektor (toga, toma, sekolah, OPD lain), hingga Pelatihan Kader Motivator ASI	
18	Pembangunan pusat layanan jantung RSUD dr. Soeselo	Pemerintah akan membangun pusat layanan jantung di RSUD dr. Soeselo. Di samping sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, pusat layanan jantung didesain sebagai keunggulan kompetitif dan keuanggulan komparatif RSUD dr. Soeselo dalam relasi RS di regional dan nasional.	
E	Prioritas: Peningkatan p	roduktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	
19	Penumbuhan kewirausahaan pemuda	Kabupaten Tegal akan mengalami bonus demografi sejak tahun 2022 dan akan berlangsung hingga tahun 2035. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mempersiapkan pemuda sebagai kelompok usia poduktif sebagai pelaku aktif pembangunan melalui rekrutmen wirausaha pemuda; pendampingan analisis bisnis, <i>chanelling</i> dan alih teknologi; serta fasilitasi produksi dan pemasaran	
20	Musrenbang Komunitas	Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, berbagai komunitas dan gender dilibatkan. Hal ini bertujuan agar hasil pemabngunan yang ada dapat mewarnai berbagai kebutuhan masyarakat yang berbasis gender. Beberapa komunitas yang saat ini selalau dihadirkan dalam proses pengambilan kebijakan antara lain: Komunitas Anak, Pemuda, Lansia, Perempuan, dan Difabel.	
F	Prioritas: Pemulihan dan pariwisata dan iklim inv	transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, estasi	
21	Optimalisasi fungsi kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK)	LIK Takaru akan ditingkatkan fungsi pelayanannya sebagai weldring centre dan packaging centre. Sebagai weldring centre, LIK akan memfasilitasi keterampilan dan keahlian di bidang pengelasan berteknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas produk logam Tegal. Sebagai packaging centre LIK akan memfasilitasi produk Tegal untuk dapat dikemas secara menarik serta tahan lama dalam proses distribusinya.	
22	Merintis skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)	Untuk melakukan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pendanaan besar pemerintah akan merintis skema pendanaan KBPU atau Public Private Partnership (PPP). Dengan skema ini, badan usaha akan melakukan pembangunan dan perawatan fasilitas publik strategis sementara pemerintah berperan selaku operator. Badan usaha memperoleh pendapatan melalui penetapan tarif yang layak oleh pemerintah atau pembayaran cicilan termin pekerjaan dari pemerintah selama jangka waktu kontrak. Setelah kontrak kerja berakhir, infrastruktur publik strategis akan dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk tahapan pertama skema KPBU akan digunakan untuk pendanaan pembangunan pusat layanan jantung RSUD dr. Soeselo. Tahapan selanjutnya KBPU akan digunakan sebagai pendanaan pembangunan infrastruktur strategis lainnya.	
23	Desa dan Komunitas Inovasi	Pemerintah kabupaten Tegal saat ini mulai merangkul masyarakat desa melalui kelompok-kelompok organisasi masyarakat desa untuk melakukan	

No	Prioritas Daerah / Inovasi Pembangunan	Gambaran Umum Inovasi
		inovasi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Ada tiga komunitas yang mulai dikembangan yaitu:
		1) Inovasi masyarakat Desa Bumijawa yang dinamakan GUNAU (Golet Urip Neng Alas Urip). GUNAU memanfaatkan lahan hutan rakyat milik Perhutani berdasarkan regulasi perhutanan sosial untuk menciptakan usaha ekonomi masyarakat dengan berkebun (kopi dan jeruk lemon spesifik) sekaligus memanfaatkannya untuk wisata alam dengan tetap menjaga keaslian ekosistem yang ada. Prinsip yang dipegang ialah bahwa hutan harus tetap lestari (Alas tetap Urip). Karena itulah dinamakan GUNAU (Golet Urip Neng Alas Urip).
		2) Komunitas inovasi lainnya yang saat ini sedang dikembangkan ialah kelompok indonesia menanam yang ada di desa Kalikangkung Kec. Pangkah. Konsepnya komunitas ini menginisiasi masyarakat desa untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam pada komoditas yang potensial. Salah satu komoditas yang dipilih dan dikembangkaan saat ini ialah durian. Masyarakat desa diajari dan difasilitasi cara menanam durian yang baik sebagai aset masa depan. Selain dapat menciptakan lapangan kerja mandiri masyarakat desa juga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.
		3) Komunitas inovasi budidaya belut alami di desa Kedungwungu Kec. Jatinegara. Konsep budidayanya ialah semi alami. Komunitas ini tetap menjaga kealamiahan sawah produktif sebagai pembibitan belut. Kemudian mereka menangkap bibit belut alami dari sawah produktif untuk kemudian dibesarkan dalam kolam budidaya yang kemudian dijual dalam berbagai bentuk produk. Untuk menjaga agar sawah produktif tersebut tetap menjadi habitat yang nyaman bagi belut untuk berkembangbiak, maka petani sekaligus kelompok tersebut menghindari pemakaian pestisida yang dapat merusak habitat alami belut.
		4) Komunitas inovasi Rakitan Rakyat Kabupaten Tegal. Komunitas ini melakukan perakitan produk lokal sperti traktor dan komponen logan lainnya dari hasil industri logam setempat terutama diwilayah Kec. Adiwerna.

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

4.12. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 direncanakan terdapat 127 Program, Selaras dengan Kebijakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai Penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Banyaknya urusan ataupun program kegiatan yang belum masuk dalam dokumen RKPD disesuaikan dengan arah dan kebijakan serta prioritas setiap tahunnya.

Sebagai penyelaras program program kegiatan SKPD yang tengah direncanakan, berikut kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagai jaring aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses, serta hasil audiensi, dan hasil studi banding Tahun 2019 Yaitu:

- 1. Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah pada sasaran Terarahnya Pengembangan Wilayah :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Program Pembangunan saluran Drainase / gorong-gorong
 - c. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
 - d. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- 2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Berdayanya Kelembagaan Desa:
 - Kebijakan Umum: Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup.
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Sasaran Menguatnya pembangunan Kehidupan Beragama :
 - Kebijakan Umum:
 - a. Pembangunan Tempat Ibadah;
 - b. Pengalokasian dan pendistribusian anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional (Bantuan Keuangan Madrasah, TPQ, Organisasi Keagamaan)
- 4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Menurunnya kesenjangan pembangunan antar desa dan antar wilayah
 - a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- 5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa
 - a. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas
 - b. Program Pengembangan lingkungan sehat
 - c. Program Pembangunan Infrastruktrur Perdesaan

Dengan tidak mengesampingkan program-program unggulan lain, bahwa penyusunan pokok pokok pikiran tersebut didasarkan pada usulan yang merupakan aspirasi prioritas dari masyarakat yang diharapkan dapat terealisasikan.